

KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

MK+

MK+ Edisi Khusus

# Radius Prawiro

Arsitek Ekonomi Indonesia





Foto Cover Tempo

#### COVER DETAIL:

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin), Radius Prawiro, saat jumpa pers tentang Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tanjung Priok di Jakarta, 1992. [TEMPO/ Sony Sumarsono; 08D/074/1992; 20040522]

---

**MK+** adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

# Daftar Isi

1. Masa Kecil Radius Prawiro



04



2. Kisah di Masa Perang

3. Jalan Ekonom Orde Baru

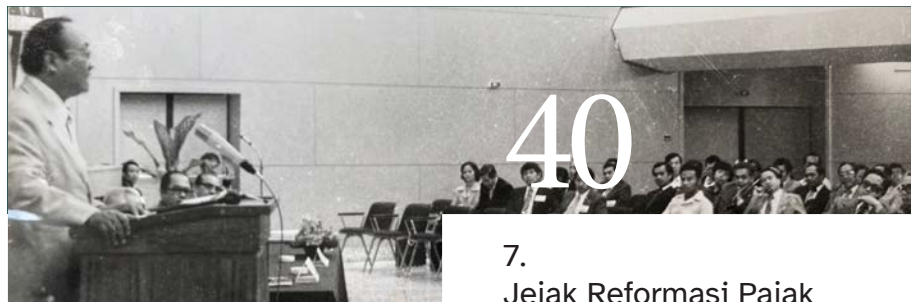


5. Kebijakan Moneter



4. Arsitek Ekonomi Orde Baru

6. Swasembada dan Koperasi



7. Jejak Reformasi Pajak



8. Kala SIAP Menghambat Pembangunan



9. Lobi-Lobi Internasional



10. Jalan Radius Sebagai Pengikut Jesus

## Infografis

64&66

**Diterbitkan oleh:** Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.  
**Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Deni Surjantoro. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi Rahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Kasubbag Publikasi Cetak Yani Kurnia A.  
**Dewan Redaksi:** Ahmady Muhajiri  
**Tim Redaksi:** Reni Saptati D.I., Rita Nurhayati, Dara Haspramudilla, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda, CS. Purwowidhu Widayanti, Ni Made Ary Ramayanti, Venggi Obdi Ovisa  
**Redaktur Foto:** Dodi Achmad Siregar, Resha Aditya Pratama, Irfan Bayu P., Tubagus Prihastomo  
**Desain Grafis dan Layout:** Tubagus Prihastomo, **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. E-mail: mediakeuangan@kemenkeu.go.id.



# 1

## Masa Kecil Radius Prawiro

Selama masa Orde Baru, Radius Prawiro menduduki jabatan-jabatan menteri yang mengurus ekonomi dan keuangan. Bidang yang sudah digelutinya sejak masa kecil.



JAM belum menunjukkan pukul 05.00 ketika Radius Prawiro sudah beranjak dari tempat tidur dan memulai aktivitas rutinnya. Menyaring susu dan memasukan ke dalam botol-botol. Setelah itu menyusun botol-botol susu ke keranjang sepedanya.

Tepat jam 05.45, dia mulai mengantarkan susu sekaligus mengambil botol-botol kosong dari para pelanggan di kawasan Kotabaru dan Klitren Lor, Yogyakarta. Setelah rampung, dia pulang ke rumah untuk sarapan dan berangkat ke sekolah di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), setingkat sekolah menengah pertama, yang berada di Kotabaru.

Itulah aktivitas rutin Radius sebagai pengantar susu pada 1940-an. Upahnya, sebesar yang

biasa diterima para loper susu, dipakainya untuk membayar iuran sekolah.

Sosok yang mengajarkannya untuk mencari uang sendiri adalah Wakidin Wirjopawiro, kakeknya dari garis ayah yang jadi pemilik perusahaan susu di Yogyakarta.

Wirjo berasal dari Desa Turen, Patalan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Di masa mudanya dia *ngenger* (mengabdikan atau bekerja) pada keluarga dokter H.S. Pruys yang mengelola Rumah Sakit (RS) Petronella (kini, RS Bethesda) milik zending (pekabaran Injil) Belanda. Di sini pulalah dia berkenalan dengan Poniym, yang kemudian jadi istrinya. Di sana pula Wirjo dan Poniym mengenal, belajar, dan memeluk agama Kristen.

\_01 Radius Prawiro di Den Haag tahun 1958 (Repro Untaian Perjalanan Leonie Radius Prawiro-Supit, hlm. 120)

\_02 Radius Prawiro menerima anugerah gelar Doktor Honoris Causa dalam Pengembangan Gereja dan Teologi di Indonesia dari de Theologische Universiteit Kampen, Nederland pada 6 Desember 2004 (Dokumen Pribadi)

\_02





## Kristen yang Taat

Radius Prawiro lahir pada 29 Juni 1928 di Rumah Sakit Petronella, Yogyakarta. Dia anak pertama dari 11 bersaudara; empat laki-laki dan tujuh perempuan, dari pasangan Rochadi Soeradi Wirjoprawiro dan Soekestri.

Ayahnya seorang guru, lulusan Kweekschool (Sekolah Guru) di Solo. Sedangkan ibunya, lulusan sekolah kebidanan di RS Boedi Kemoeliaan Jakarta, bekerja sebagai bidan di RS Katolik Onder de Bogen yang kemudian dikenal dengan nama Panti Rapih.

“Ayahnya seorang yang sangat disiplin dan menanamkan kedisiplinan itu secara ketat kepada anak-anaknya. Di sekolah pun ia dikenal sebagai guru yang keras dan galak,” catat Sudarno Sumarto dkk. dalam biografi *Radius Prawiro: Kiprah, Peran dan Pemikiran*.

Radius tumbuh dari keluarga Kristen yang taat. Kekristenan keluarga ibunya berasal dari Kyai Sadrach, seorang penyebar Kristen Jawa, kendati kemudian lebih berorientasi pada kekristenan Gereja Protestan. Sedangkan ayahnya mendapat pendidikan Kristen dari Mbah Wirjo, pengikut iman Kristen Calvinis yang dianut mayoritas orang Belanda.

Dalam corak Kristen Protestan Calvinis itulah Radius dididik oleh orang tuanya. Ajaran cinta kasih dan disiplin moral tinggi tertanam dalam keseharian. Radius jadi jauh dari kebudayaan Jawa. Kegemarannya menonton wayang tak bisa tersalurkan. “Ia bahkan menyesal dan mengaku kurang lengkap sebagai orang Jawa karena seolah-olah tercerabut dari akar budayanya,” catat Sudarno Sumarto dkk.

Kendati tak mudah, Radius menaati orang tuanya sebab yang mereka ajarkan diyakini “murni” dari Tuhan. Seiring waktu, Radius bisa melupakan “kesenangan-kesenangan duniawi” karena ketebalan imannya sudah baik.

Di sisi lain, Radius terkesan dengan corak kegiatan sosial dari zending Kristen di Yogyakarta, terutama pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kelak, ia menerapkan dalam lapangan pengabdian dan pelayanan. Apalagi setelah pensiun dari jabatan pemerintahan.

### Kualitas Pertama

Sejak kecil, Radius Prawiro sudah mengenal kerasnya kehidupan. Di usia setahun, dia dibawa keluarganya ke Garut, Jawa Barat. Di sana, ayahnya bekerja sebagai guru sekolah zending, sedangkan ibunya berpraktik sebagai bidan. Namun, pada 1931, mereka pindah ke Toraja, Sulawesi Selatan. Ayahnya mengajar di Schakelschool (Sekolah Peralihan) di Makale dan ibunya tetap menjalankan praktik bidan.

Ketika menginjak masa sekolah, Radius bersama adiknya, Suradi, dikirim ke Yogyakarta. Mereka tinggal bersama Mbah Wirjo. Di sinilah mereka dididik dan ditempa menjadi pribadi yang disiplin, pekerja keras, dan hidup hemat. Ia juga bekerja sebagai loper susu di perusahaan susu Mbah Wirjo, yang sedang merasakan masa kejayaan.

Mbah Wirjo dikenal ulet. Ia pernah berdagang tembakau, batik, hingga jadi pengusaha susu terkenal di Yogyakarta. Radius tak tahu bagaimana mula Mbah Wirjo membangun usaha susu sapi.

Saat itu, di daerah Sentul, sebuah kampung tak jauh dari Pura Pakualaman, ada perusahaan susu perah yang dikelola oleh orang Kristen. Perusahaan itu dikenal dengan nama “SK”. Kemungkinan Mbah Wirjo memperoleh seekor sapi dari perusahaan tersebut dengan sistem *nggadhu* (bahasa Jawa: menjadi pemelihara), dengan imbalan bagi hasil berupa anak sapi. Bisa juga Mbah Wirjo memperoleh seekor sapi dari dr. Pruys dan kemudian mengembangiakkannya.

Perusahaan susu milik Mbah Wirjo di Jalan Klitren Lor terbelang modern. Bahkan berdasarkan penelitian dari Veterinair Hygienische Dienst (Dinas Kesehatan Hewan) Yogyakarta, yang rutin dilakukan setiap bulan, perusahaan ini masuk kategori kualitas pertama. Misalnya, dilansir koran *De Locomotief*, 12 Agustus 1932, produk susunya masuk kategori kualitas pertama dengan komposisi susu dinilai bagus, kondisi susu (sangat bagus), dan perusahaan (sangat bagus).

Pekerjaan mengantar susu menempa Radius menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, dan pekerja keras. Pengalaman ini juga mempengaruhi pilihan hidupnya kemudian.

“Pengalaman berhadapan dengan berbagai kemungkinan, untung dan rugi ketika harus mulai berhitung di perusahaan kakeknya, menjadi motivasi baginya untuk memilih jurusan perusahaan dan akuntansi,” catat Sudarno Sumarto dkk.

Radius tinggal bersama Mbah Wirjo hanya sementara. Ayah dan ibunya kembali ke Yogyakarta. Mereka bisa berkumpul kembali.



\_03 De Locomotief, 12  
Agustus 1932  
\_04 De Locomotief, 19  
Oktober 1938

**Melkonde zoek te Jonga.**

Wij ontvingen een overzicht van het melkonderzoek van den Veterinaire Hygiënischen Dienst te Jongaakarta over de maand Juli 1938.

Samenstell. Toestand

| Eerste kwaliteit    | Derde          | Derde      | Bedrijf        |
|---------------------|----------------|------------|----------------|
| De Hout             |                |            |                |
| Trinora Boeve       | zeer goed      | uitmuntend | zeer goed      |
| H. M. Bacher        |                |            |                |
| Wiek Kote Gede      | zeer goed      | zeer goed  | ruim voldoende |
| De Broun            |                |            |                |
| Melk Bagan          | zeer goed      | zeer goed  | ruim voldoende |
| Van Gert            |                |            |                |
| Melk Pemberton      | zeer goed      | uitmuntend | zeer goed      |
| Hansen              |                |            |                |
| Boerderij Eliza     | zeer goed      | uitmuntend | zeer goed      |
| Klute               |                |            |                |
| Melk Wiraga         | uitmuntend     | uitmuntend | zeer goed      |
| V. Krijnenbergh     |                |            |                |
| Melk K. B. Modjo    | uitmuntend     | uitmuntend | zeer goed      |
| Kleyn               |                |            |                |
| Melk Barangen       | zeer goed      | uitmuntend | zeer goed      |
| Kuders              |                |            |                |
| Melk Santoni        | goed           | uitmuntend | idem           |
| Lie K. K. Pang      |                |            |                |
| Melk Soerolantzen   | goed           | zeer goed  | ruim voldoende |
| Marnand             |                |            |                |
| Melk Kopech         | goed           | zeer goed  | goed           |
| Mangondimedjo       |                |            |                |
| Melk W. Boto        | ruim voldoende | zeer goed  | goed           |
| B. H. Ngommar       |                |            |                |
| Melk Palanok        | zeer goed      | zeer goed  | ruim voldoende |
| Smith               |                |            |                |
| Boerderij Louie     | goed           | uitmuntend | zeer goed      |
| Tuyman              |                |            |                |
| Hygie Melk Exo      | zeer goed      | uitmuntend | uitmuntend     |
| Tan Bie Sen         |                |            |                |
| Melk K. Ijck        | zeer goed      | zeer goed  | goed           |
| Wirjopawiro         |                |            |                |
| Melk Kittenler      | goed           | zeer goed  | zeer goed      |
| Braslet             |                |            |                |
| Melk Kisten         | zeer goed      | zeer goed  | —              |
| Santoni             |                |            |                |
| Melk H. V. N. N. N. | zeer goed      | uitmuntend | —              |
| Tweede kwaliteit:   |                |            |                |
| H. Kall             |                |            |                |
| Melk Glagah         | ruim voldoende | zeer goed  | ruim voldoende |
| B. Karadjawiro      |                |            |                |
| Melk W. Boto        | volgende       | goed       | ruim voldoende |

\_03

**MELKRAPPORT.**

Wij laten hiermede de gegevens volgen van het Melkrapport over de maand September 1938.

| Naam v/d eigenaars            | Samenstelling der melk | Toestand der melk | Bedrijf        |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Eerste kwaliteit:             |                        |                   |                |
| O. v. d. Berghe               |                        |                   |                |
| (Klein, Keblangan Sindoeng)   | zeer goed              | uitmuntend        | uitmuntend     |
| De Broun                      |                        |                   |                |
| (Tjamarah-Hocya Djetis 22)    | zeer goed              | uitmuntend        | zeer goed      |
| Hansen                        |                        |                   |                |
| (Boerderij Eliza Karangwaroe) | uitmuntend             | uitmuntend        | zeer goed      |
| Kleyn                         |                        |                   |                |
| (de V. van Ngoto)             | goed                   | uitmuntend        | zeer goed      |
| The Tjine Gwee                |                        |                   |                |
| (“Jan” Glagah)                | zeer goed              | zeer goed         | goed           |
| Tuyman                        |                        |                   |                |
| (Hygie Melkhandel Weynschenk) | uitmuntend             | uitmuntend        | uitmuntend     |
| (Boerderij Louise Sentod)     | goed                   | uitmuntend        | zeer goed      |
| Wirjopawiro                   |                        |                   |                |
| (Hygie Melkhandel Kittenler)  | zeer goed              | uitmuntend        | zeer goed      |
| Vroom                         |                        |                   |                |
| (Melk Tegalari)               | zeer goed              | zeer goed         | ruim voldoende |
| Naam v/d eigenaars            | Samenstelling          | Toestand          |                |

\_04

Pada 1934, di usia enam tahun, Radius masuk Hollandse-Javaanse School Bintaran Wetan, yang lazim disebut *Bijbel Wetan*. Di sekolah itu pula ayahnya menjadi pengajar. Di masa ini Radius masuk organisasi kepanduan Kristen Tridharma yang memberikan kesadaran kebangsaan. Selain itu mendirikan dan memimpin perkumpulan sepak bola yang dinamakan Rukun Agawe Santosa (RAS).

Radius menyelesaikan pendidikan di HJS dengan baik. Dia melanjutkan pendidikan di MULO pada 1941. Namun di tahun pertama sekolah, perang keburu pecah.

## Masa Sulit

Pendudukan Jepang di Indonesia berdampak pada kehidupan keluarganya. Perusahaan susu segar milik kakeknya sulit beroperasi dan bahkan perlahan runtuh. Sekolah-sekolah zending ditutup sehingga ayahnya tak lagi menerima gaji sebagai pengajar. Institut Wirpa (kependekan dari Wirjopawiro), lembaga kursus bahasa Belanda, yang didirikan ayahnya pun surut karena kekurangan murid.

Kondisi sulit memaksa ayahnya pindah ke Pakem, kota kecil di utara Yogyakarta, dan mencoba bertahan hidup dengan membuat lampu dan sejenis korek api. Radius dan saudara-saudaranya bertugas untuk menjajakan dari pintu ke pintu.

Selain itu, dengan modal satu gulden, Radius mulai berdagang. Dengan mengandalkan sepedanya, dia menjual barang-barang dagangannya hingga ke Solo dan

Tawangmangu. Di sepanjang perjalanan, dia menawarkan korek api bersumbu, klembak, gambir, dan sebagainya. Karena kondisi sulit, tak mudah mencari pembeli. Kalau pun, ada minta pembayaran di belakang.

“Karena itu, dagangan yang terjual sangatlah sedikit,” kenangnya.

Setelah keadaan membaik, Radius melanjutkan sekolahnya di SMP I di Jalan Terban Taman, Yogyakarta. Di luar kesibukan sekolah, dia masih rajin berdagang. Sebagaimana ditulis dalam buku *Apa & Siapa 1985-1986*, Radius pernah menjadi penjual rokok ketika masih di bangku SMP yang digunakannya untuk sekolah dan keperluan sehari-hari.

Selain itu, bersama teman-temannya, dia ikut mendirikan organisasi Pelajar Kristen Mataram (Pelkrima). Radius ditunjuk sebagai pembantu umum. Pelkrima kerap mengadakan kegiatan pemahaman Alkitab, belajar menyanyi dan paduan suara, serta olahraga.

Menurut Bambang Subandrijo dalam *Pernak-pernik Perjalanan Sejarah Radius Prawiro*, Pelkrima tak mendatangkan kecurigaan Jepang karena dipandang sebagai perkumpulan keagamaan. Padahal, Radius dan kawan-kawannya kerap menjadikan Pelkrima sebagai wadah berkomunikasi dan bertukar pikiran mengenai politik serta menjalin kontak dan menggalang persatuan dengan para pemuda lainnya.

Selepas SMP, Radius mulai belajar mandiri. Dia tidak lagi tinggal di rumah orang tuanya, tetapi di salah satu ruangan di SMP depan RS Panti Rapih. Dia mencari tambahan uang saku dengan menstensi diktat seorang

guru dan menjualnya kepada siswa yang membutuhkan lewat ketua kelas masing-masing.

Pengalaman berdagang sejak kecil hingga remaja mempengaruhi hidup Radius kemudian. Dia memilih kuliah jurusan ekonomi dan akhirnya menduduki jabatan-jabatan menteri yang mengurus bidang ekonomi. Dan Radius tak bisa melupakan semangat yang diajarkan kakeknya.

Pada 1928, sewaktu masih balita dan orang tuanya tinggal di Parakan, Mbah Wirjo datang menjenguk dengan naik sepeda dari Yogyakarta. Rupanya dia baru melihat dari dekat proses

penuaian, pengeringan, dan penggarapan tembakau Parakan sebelum dikirim ke Yogyakarta. Cerita ini dituturkan ayahnya yang tahu persis kepandaian kakeknya dalam perdagangan tembakau.

“Jika cerita menarik ini saya renungkan kelak, saya berpikir dan bertanya kepada diri sendiri: apakah Mbah Wirjo sudah merasa bahwa di kemudian hari, cucunya sebagai menteri perdagangan akan terbang ke Hamburg untuk mengecek mekanisme perdagangan tembakau yang kita pasarkan di bursa tembakau di sana?”

\_05 Radius Prawiro saat kecil (berdiri sebelah kiri dengan pakain putih-putih). (Dokumen Pribadi)

\_06 Radius Prawiro (keempat dari kiri) dalam Third Plenary Meeting Indonesia-Jepang Joint Economic Comitte di Hotel Hilton pada 3 Desember 1981. (Perpusnas RI)



\_06

\_05



08





Ya, didikan orang tua dan kakek-neneknya menjadi bekal yang berharga bagi perjalanan hidup Radius Prawiro.



# 2

## Kiprah di Masa Perang

Di masa perang, jiwa mudanya bergelora. Dia ikut beragam organisasi pemuda dan pelajar. Mencari dana perjuangan. Bahkan ikut memanggul senjata demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

\_01





**R**ADIUS Prawiro mengalami masa-masa sulit di zaman Jepang. Setelah

Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, hidup belum sepenuhnya normal. Belanda ingin menguasai kembali bekas koloninya. Para pemuda bergerak. Perang berkecamuk. Radius, yang duduk di bangku SMA, pun terdorong untuk ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Saat itu ada seruan kepada seluruh pemuda yang belum maupun sudah pernah memperoleh latihan militer untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Radius pun bergabung dengan TKR dan ditempatkan di bagian sandi. Di sana, dia belajar mengenai sandi dan melayani pengiriman berita-berita ke berbagai *front* dari markas besar di Yogyakarta.

Selang beberapa saat, Radius dikirim ke Solo untuk mengikuti pelatihan menjadi markonis. Sayangnya, dia hanya bertahan beberapa bulan karena membela kawannya.

Ceritanya, kawannya dihukum oleh guru karena melanggar peraturan. Radius memahami siswa yang melanggar harus dihukum, namun dia mempersoalkan hukuman yang diberikan hingga memicu perdebatan sengit. Dia disuruh “keluar”. Tak terima begitu saja, Radius menghadap direktornya, Mayor Sarwono, untuk menyatakan keluar dari pelatihan.

“Keluar dari mana? Bukankah kamu hanya disuruh keluar kelas?” Mayor Sarwono keheranan.

“Tidak! Pokoknya saya disuruh keluar!”

Pernyataan itu sesungguhnya tak dikehendaki oleh Mayor

\_01 Radius Prawiro dalam upacara peringatan HUT KOPRI ke VII pada 29 November 1978. (Perpusnas RI)

\_02 Menteri Perdagangan dan Koperasi Radius Prawiro menerima Menteri Urusan Kerja Sama Pembangunan Belanda J. de Koning beserta stafnya di Departemen Perdagangan pada 14 September 1978. (Perpusnas RI)



\_02

Sarwono. Pasalnya, Radius dikenal pandai. Namun, kerasnya keinginan Radius membuat Mayor Sarwono melepaskan anak didiknya.

Selama di Solo, Radius juga menggerakkan dan memimpin Pergerakan Pemuda Kristen Indonesia (PPKI) cabang. Di PPKI sendiri, dia cukup disegani karena pernah membentuk perkumpulan Pelajar Kristen Mataram (Pelkrima) dan bahkan jadi ketuanya. Menurut Soetjipto Wirowidjojo, salah seorang pendiri PPKI nasional, Radius bisa dimanfaatkan keterampilannya dalam mempromosikan organisasi pemuda Kristen, khususnya di bidang sandiwara.

“Di bidang-bidang lain, saya kurang mencermatinya lanjut,” tutur Natanael Daldjoeni, salah satu kawannya dalam *Radius Prawiro: Kiprah, Peran, dan Pemikiran*.

Setelah keluar dari pelatihan markonis, Radius kembali ke Yogyakarta. Dia tetap aktif di PPKI sembari melanjutkan

pendidikan SMA yang sempat terhenti. Namun, niat menyelesaikan sekolah ternyata belum kesampaian. Menyusul agresi militer Belanda, sekolah-sekolah terpaksa diliburkan.

Radius memutuskan bergabung dengan Tentara Pelajar di bawah pimpinan Martono, yang kelak menjabat sebagai Menteri Transmigrasi. Dia bergerilya di Yogyakarta sebelah utara, daerah Kentungan, Ngaglik, hingga daerah Pakem, Kaliurang.

## Diuber Belanda

Mula-mula Radius bergabung dengan Ikatan Pelajar Indonesia (IPI), yang lahir hanya beberapa waktu setelah proklamasi kemerdekaan. Memenuhi tuntutan anggotanya agar IPI punya pasukan tempur, dibentuklah apa yang disebut IPI Bagian Pertahanan –kelak, berubah jadi Markas Pertahanan Pelajar. Inilah awal-mula Tentara Pelajar.

Menurut Soebagijo Ilham Notodidjojo dalam *Perjuangan*



\_03

*Pelajar IPI-IPPI*, yang dikerjakan IPI Yogya tidak berbeda dari IPI daerah lain, yaitu mengadakan penerangan di sekeliling karesidenan, bahkan sampai ke Magelang, Salatiga, Solo, dan Boyolali. Lazimnya, rombongan IPI Yogya membawa *slides* dalam bentuk poster-poster. Kadang mengumpulkan dana dengan cara memborong beberapa film di gedung bioskop. Setelah agresi militer Belanda I, IPI Bagian Pertahanan mulai aktif dan mempunyai markas sendiri dengan segala kegiatan terkait pertempuran. Segala tenaga pelajar dikerahkan, kendati waktu itu belum dinamakan mobilisasi pelajar.

IPI Yogya dibagi dalam dua Commissariaat besar, yakni Dalam Kota dan Luar Kota. Commissariaat Dalam Kota (CKD) dipimpin oleh Bachtiar Yahya, sedangkan Commissariaat Luar Kota (CLK) dipimpin oleh Radius Prawiro. Masing-masing mempunyai staf di kapanewon atau kecamatan sampai di pelosok-pelosok. Kegiatannya terutama di bidang sosial dan penerangan.

IPI kemudian menjadi Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), sebuah organisasi perjuangan tanpa warna politik apapun. Strukturnya sedikit berubah. Iljas Fathoni menjadi ketua CLK. Sedangkan Radius menduduki posisi ketua CKD.

Ketika Yogyakarta diduduki Belanda, Radius memobilisasi pelajar. Dia juga pernah melakukan aksi heroik. Dicatat Soebagijo Ilham Notodidjojo, Radius meledakkan pabrik cerutu Negresco (Taru Martini) di Baciro sehingga diburu oleh Belanda. Untuk itu, perubahan dilakukan terhadap struktur IPPI. Radius diperintahkan ke luar kota dan menjabat ketua CLK IPPI; tukar tempat dengan Iljas Fathoni.

Di masa-masa inilah Radius mendapat nama baru: Prawiro. Nama ini selalu dipakainya ketika bergerilya di luar kota maupun mengadakan hubungan dengan kawan-kawan di dalam kota yang bertugas mencari logistik dan obat-obatan. Nama Prawiro cukup membingungkan pihak Belanda, yang terus memburunya.

Sejak itu, nama Prawiro melekat pada dirinya. Nama Radius Prawiro kemudian tetap digunakan hingga akhir hayatnya.

Di CLK, Radius menunjukkan keterampilannya di bidang keuangan. Alasannya, tutur Natanael Daldjoeni, uang yang tersedia serba pas-pasan sehingga Radius dan stafnya mencari akal dan memutar modal demi kelestarian perjuangan para pelajar yang dikerahkannya. Atas inisiatifnya, CLK membeli beberapa drum minyak tanah.

Namun, tak selalu usahanya berhasil. Hujan deras membuat drum-drum minyak tanah yang dideretkan di pinggir gedung SD kemasukan air. Pedagang Tionghoa yang semula bersedia membeli, mengurungkan rencananya.

“Radius merasa terpukul oleh kerugian besar tadi,” ujar Natanael Daldjoeni.

Saat menghadapi agresi militer Belanda II, kesatuan pelajar pejuang bersenjata dimasukkan ke kesatuan otonom dalam jajaran Tentara





\_04

Nasional Indonesia (TNI), yakni Brigade 17 TNI. Brigade 17 TNI selanjutnya dibagi menjadi lima detasemen, yakni Detasemen I (TRIP) di Jawa Timur, Detasemen II (TP) di Solo, Detasemen III (TP) di Yogya, Detasemen IV di Jawa Barat, dan Detasemen V/Detasemen Khusus (TGP).

Radius menjabat ketua Seksi Kesejahteraan Seksi II Detasemen III Brigade 17. Suatu kali, kawan-kawannya butuh dana perjuangan. Selama sehari-hari Radius menghilang. Lalu, tiba-tiba dia muncul dengan membawa uang yang dibutuhkan.

“Ia ternyata berhasil mencari bantuan uang untuk keperluan perjuangan teman-temannya pada Sri Sultan yang menaruh kepercayaan pada kejujuran pemuda Radius,” ujar Natanael.

Saat itu Radius menjadi staf Bagian Penerangan Gubernur Militer Yogyakarta yang dijabat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Hubungan dengan Sri Sultan berlanjut setelah masa perang.

## Ikatan Dinas

Setelah penyerahan kedaulatan, Radius melanjutkan pendidikan SMA. Setelah lulus, dia kuliah di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM). Selain menuntut ilmu, Radius menyibukkan diri dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Yogyakarta.

Menjelang akhir 1950, Radius ditunjuk sebagai ketua GMKI cabang Yogyakarta. Ada beberapa pertimbangan atas penunjukannya. Selain perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, saat itu Radius punya gaji sebagai tentara berpangkat letnan. Karena itulah, menurut rekan-rekannya, Radius lebih siap untuk memimpin organisasi.

Tugas utama Radius adalah mempersiapkan dan memastikan cabang untuk menghadiri kongres GMKI di Sukabumi pada Desember 1950. Ada kisah menarik ketika Radius dan rombongan hendak pergi ke Sukabumi. Radius membuat surat jalan untuk diri dan

\_03 Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam rangka pencalonan sebagai Wakil Presiden RI, mengadakan makan bersama beberapa tokoh. Dari kiri ke kanan : Radius Prawiro, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Letjen Suprajogi, Laksamana Budiardjo, Frans Seda dan Danudirdjo. (Perpusnas RI)

\_04 Menteri Perdagangan Radius Prawiro menjelaskan kepada wartawan dan para pengusaha mengenai masalah perdagangan komoditi di Press Club Indo, Jakarta pada 22 Juni 1977. (Perpusnas RI)

seluruh rombongan. Surat distempel oleh detasemennya. Selain berlaku sebagai surat jalan, catat Bambang Subandrijo dalam *Pernak-Pernik Perjalanan Sejarah Radius Prawiro*, surat itu dimanfaatkan sebagai tiket gratis untuk naik kereta untuk menghadiri kongres di Sukabumi.

Radius tak lama berkiprah di GMKI. Karena pusat perjuangan kembali ke ibu kota Jakarta, dia memutuskan pindah. Selain karena keluarganya lebih dulu pindah ke Jakarta, dia yakin dirinya bisa lebih berkembang di sana. Keputusan itu berdampak pada studinya. Dia menghentikan pendidikannya di Fakultas Teknik UGM dan pindah ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Saat itu, pemerintah memberikan ikatan dinas kepada mahasiswa sesuai kebutuhan tenaga ahli di kementerian-kementerian. Radius memperoleh ikatan dinas dari Kementerian Keuangan dan terdaftar sebagai karyawan di sana.



Sebagai “kuliah”, Radius bergaul lebih intensif dengan para senior GMKI dan PPKI serta banyak tokoh dari beragam organisasi. PPKI sendiri kemudian fusi dengan Majelis Pemuda Kristen Oikumene (MPKO) menjadi Lembaga

Pemuda Kristen Indonesia (LPKI) pada 1952 di mana Radius tercantum sebagai pengurus. Kesibukannya berorganisasi sempat membuat gerah ayahnya yang khawatir pendidikannya akan terganggu.

“Bapak, akan saya tunjukkan bahwa semua aktivitas yang saya lakukan itu kelak akan ada gunanya,” ujar Radius kepada ayahnya, yang setelah pengakuan kedaulatan keluar dari dinas militer dan bekerja di Biro Hukum Departemen Pertahanan.





\_05

Radius tak main-main dengan ucapannya. Terbukti, dia lolos seleksi untuk kuliah ekonomi di Negeri Belanda.

---

\_05 Menteri Perdagangan Radius Prawiro menjelaskan kepada wartawan dan para pengusaha mengenai masalah perdagangan komoditi di Press Club Indo, Jakarta pada 22 Juni 1977. (Perpusnas RI)



# 3

## Jalan Ekonom Orde Baru

Menimba ilmu ekonomi di Rotterdam dan Jakarta. Bergiat dalam organisasi profesi dan kekaryaan. Jalan Radius Prawiro untuk berkiprah dalam lembaga-lembaga negara dan pemerintahan pun terbuka lebar.





\_01

\_01 Presiden Soeharto menerima Menteri Perdagangan Radius Prawiro di gedung Bina Graha Jakarta pada 2 Juni 1981. (Perpusnas RI)

\_02 Sumitro Djojohadikusumo, Wilopo, dan Radius Prawiro sesudah dilantik menjadi menteri kabinet pembangunan II di Istana Negara pada 27 Maret 1973. (Perpusnas RI)



\_02

**S**EJAK semula Radius Prawiro memiliki cita-cita menjadi seorang ekonom. Pengalaman bekerja di perusahaan susu kakeknya hingga berdagang kecil-kecilan menumbuhkan hasratnya untuk belajar ekonomi secara formal. Karena itu, ketika tawaran untuk belajar ekonomi di Negeri Belanda dari pemerintah, Radius tak mau menysia-nyiakan kesempatan ini. Dia mendaftar dan mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Setelah melalui tahapan seleksi, Radius akhirnya diterima sebagai mahasiswa *Nederlandsche Economische Hogeschool* (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam yang kemudian berkembang menjadi *Erasmus Universiteit*.

Bidang studi yang dipilihnya adalah ekonomi perusahaan. Maka, Radius meninggalkan dinas kemiliteran dan pada Agustus 1953 berangkat ke Belanda dengan menumpang kapal *Willem Ruys*.

Radius bukan orang Indonesia pertama yang kuliah di sana. Ada nama-nama besar ekonom Indonesia yang pernah kuliah di sana seperti Mohammad Hatta dan Sumitro Djojohadikusumo. Di masanya, beberapa mahasiswa Indonesia di Rotterdam yang kemudian menjadi orang penting antara lain Arifin Siregar, Hendro

Budianto, dan kemudian Kwik Kian Gie.

“Dia kepala ‘geng’ *Rotterdamers*,” ujar Utomo Josodirdjo, salah satu akuntan terkemuka Indonesia, dalam memoirnya *A Journey Through Time*.

Sumitro, Radius, dan Arifin kemudian sering disebut-sebut sebagai “Mafia Rotterdam”, julukan untuk ekonom-ekonom lulusan Rotterdam yang terlibat dalam mendesain ekonomi Orde Baru.

## Pujaan Hati

Di Rotterdam, Radius serius belajar. Tak mau tergoda oleh hal-hal baru dan pergaulan bebas di sana. Citra inilah yang dilihat oleh Ds. W. Fijn van Draat selaku pendeta bagi para mahasiswa Indonesia di Eropa dalam buku *Radius Prawiro: Kiprah, Peran dan Pemikiran*.



\_03

“Dengan semangat dan tekad membaja, dia menceburkan dirinya dalam kancah studi ekonomi, terdorong oleh cita-cita bahwa apa yang diperlukan Indonesia untuk mengejawantahkan kemakmurannya bersendi pada ekonomi yang sehat,” catat Van Draat.

Seperti kebanyakan mahasiswa, Radius menggunakan sebagian waktunya untuk berdiskusi bersama kawan-kawan sesama orang Indonesia. Perbaikan ekonomi Indonesia adalah salah satu topiknya. Era 1950-an, perekonomian Indonesia masih memprihatinkan. Di antaranya karena kondisi politik yang belum stabil.

Radius juga aktif dalam kegiatan organisasi. Tak lama setelah kedatangannya di Belanda, dia bergabung ke

dalam Societas Studiosorum Reformatorum (SSR, Perhimpunan Mahasiswa Gereformeed). Selain itu, melibatkan diri dalam Perserikatan Kristen Indonesia (Perki) cabang Rotterdam dan bahkan pernah menjadi ketua.

Perki didirikan oleh para pemuda-mahasiswa Indonesia di Belanda pada 1930 dengan nama Indonesische Christen Jongen Vereniging. Perki bukan hanya menjadi wadah bagi Radius untuk bertukar pikiran mengenai berbagai persoalan Indonesia maupun internasional. Di organisasi itu pula dia bertemu dengan Leonie Supit, pelajar berdarah Minahasa yang sedang studi bahasa di Belanda. Radius menikahi pujaan hatinya itu di Den Haag pada 5 Juli 1958.

Tak hanya Perki, Radius juga aktif dalam Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Belanda.

Bahkan selama 1956 hingga 1957, dia menjadi anggota Dewan Pimpinan Pusat PPI.

PPI terbentuk berdasarkan rapat pendirian di Amsterdam pada 19 April 1952. Seiring pembentukan PPI Pusat yang berkedudukan di Delft, dibentuk pula PPI cabang Amsterdam, Leiden, Delft, dan Utrecht. Sekitar tiga bulan kemudian terbentuk PPI cabang Rotterdam.

Selain itu, Radius menggunakan waktu luangnya untuk mengajar ilmu pasti di sekolah untuk anak-anak Indonesia di Den Haag dan sekolah minggu di Gereja Gereformeed.

Pada akhir studi, Radius menyusun skripsi tentang industri dan perusahaan menengah dengan judul “Subcontracting and Multisources Principles”. Pembimbingnya adalah





\_04

\_03 Pernikahan Radius dan Leonie di Den Haag pada tanggal 5 Juli 1958. (Repro *Untaian Perjalanan Leonie Radius Prawiro-Supit*, hlm.39)

\_04 Radius Prawiro saat menandatangani akad nikah di Kantor Sipil Balai Kota Den Haag. Repro *Untaian Perjalanan Leonie Radius Prawiro-Supit*, hlm.39)

Prof. Brands untuk ekonomi perusahaan dan Prof. Wisselink untuk ekonomi perindustrian. Dalam skripsi tersebut, Radius menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional di masa itu biasanya membangun industri berdasarkan “*multisources principles*”.

Pada Januari 1960, Radius menghadapi ujian skripsi. Dia dinyatakan lulus sarjana ekonomi perusahaan dan menyandang gelar Doctorandus (Drs).

Semangat belajar sembari memperoleh uang tambahan mendorong Radius untuk magang di Zendingscentrum (Pusat Zending) di Kota Baarn selama empat bulan. Sejak Februari hingga Mei 1960, dia mendapat pelatihan keterampilan di bidang percetakan dan penerbitan Kristen.

Setelah kegiatan magangnya selesai, pada Juni 1960, Radius dan Leonie pulang ke tanah air.

## Belajar Akuntansi

Sekembalinya dari Belanda, Radius menemukan Indonesia seolah tak memerlukan sarjana ekonomi perusahaan. Banyak perusahaan Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Sementara perusahaan-perusahaan milik Belanda dinasionalisasi terkait sentimen perebutan Irian Barat (Papua).

“Komunis waktu itu menganggap ekonom tidak diperlukan,” kata Radius, dikutip *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa* karya M. Dawam Rahardjo.

Atas dasar itulah, selain alasan lainnya, Radius terdorong untuk bersekolah lagi dan masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Dalam waktu dua tahun studinya selesai dan lulus sebagai sarjana akuntansi.

Radius kemudian bekerja di Kementerian Keuangan

dan ditempatkan di Direktorat Akuntan Negara.

“Sejak dari Rotterdam, Pak Radius bilang dia mau kerja untuk pemerintah, mau membantu negara dengan jalur itu. Dia tidak pernah menjadi *businessman*,” ujar Utomo Josodirdjo. Menurutnya, dari 60 lulusan Rotterdam, hanya lima atau enam alumni yang kemudian berkecimpung di sektor swasta. Sebagian besar berkarier sebagai pegawai negeri.

Karier Radius meningkat dengan pengangkatannya sebagai kepala Kantor Akuntan Negara Direktorat Akuntan Negara pada Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Sebagai akuntan, Radius bergabung dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), organisasi profesi yang didirikan tahun 1957. Bahkan, sejak 1963, dia terpilih sebagai ketua IAI; menggantikan Soemarjo

Tirtosidojo yang merupakan salah seorang perintis IAI.

Menjadi pegawai negeri tak membuatnya abai untuk mengikuti perkembangan politik. Untuk memperoleh gambaran mengenai situasi nasional, Radius kerap berdiskusi dengan Johannes Leimena atau biasa dipanggil Om Jo, pemuka Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang menjabat Wakil Perdana Menteri. Kepada Leimena, Radius berpendapat, untuk memperbaiki keadaan negara, pembangunan ekonomi tidak mungkin dikesampingkan.

“Dalam kesatuan politik, masalah ekonomi harus mendapatkan perhatian utama,” katanya.

Kala itu jargon yang dominan adalah politik sebagai panglima. Radius khawatir dan melihat potensi bahaya dari perkembangan gerakan komunis yang mendapat dukungan kuat dari Uni Soviet dan Tiongkok. Menurut pandangannya, demokrasi tersendat-sendat karena pengaruh komunis.



---

\_05 Rapat Kerja Komisi APBN DPR dengan Menteri Perdagangan dan Koperasi Radius Prawiro di gedung DPR pada 10 Oktober 1979. (Perpusnas RI)

“Gagasan Nasakomisasi partai-partai telah membelenggu demokrasi,” ujar Radius. “Hal itu merupakan kemustahilan yang dipaksakan. Bagaimana mungkin agama dapat dicampuradukkan dengan ajaran komunis?”

## Usul Sultan

Radius tak tertarik masuk Parkindo. Dia memilih aktif dalam Intelegensia Kristen Indonesia, yang kemudian jadi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI). Organisasi ini didirikan pada Desember 1963 dengan tujuan untuk menghimpun pemikiran-pemikiran Kristen.

Dengan membawa bendera Intelegensia Kristen Indonesia, Radius terlibat dalam pembentukan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada 20 Oktober 1964. Namun, karena konflik





dengan JCT Simorangkir, ketua Intelegensia Kristen dan juga pimpinan DPP Parkindo, Radius mengusung bendera Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), di mana dia menjadi wakil ketuanya, dalam Sekber Golkar.

Sekber Golkar awalnya adalah wadah dari golongan fungsional/golongan karya yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Dalam Sekber Golkar, Radius tercatat sebagai anggota Dewan Pimpinan Harian. Dia juga mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk

mengembangkan pemikirannya. Dalam komisi-komisi kerja yang dibentuk, ia ditunjuk sebagai ketua komisi ekonomi.

Sementara masih menjabat anggota Dewan Pimpinan Harian Sekber Golkar, Radius diangkat menjadi pejabat setara menteri sebagai Pemeriksa Keuangan Agung Muda/anggota pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BAPEKA) dalam Kabinet Dwikora I. Secara struktur, dia berada di bawah koordinasi Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sejak 1964, Sri Sultan diangkat sebagai Menteri/Ketua

Pimpinan BAPEKA yang setara dengan menteri koordinator departemen.

“Ia sadar bahwa pengangkatannya sebagai anggota BAPEKA adalah atas usul Sri Sultan yang telah mengenal dirinya dengan baik sejak di Yogyakarta,” catat Bambang Subandrijo dkk. dalam *Pernak-pernik Perjalanan Sejarah Radius Prawiro*.

Melalui Sekber Golkar, yang kemudian menjadi Golkar sebagai penopang utama kekuasaan Orde Baru, Radius menduduki posisi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan menteri. Sejak 1973, Radius duduk sebagai anggota Dewan Pembina Golkar.

Karier Radius juga tak tergoyahkan. Selain menjadi salah satu arsitek ekonomi Orde Baru, dia terus berkiprah di lembaga-lembaga negara dan pemerintahan yang mengurus ekonomi dan keuangan. Bahkan tercatat sebagai menteri terlama era Orde Baru.



# 4

## Tim Ekonom Orde Baru

Menjadi bagian dari tim ahli ekonomi yang merancang dan mengawal pembangunan Orde Baru. Menangani krisis demi krisis ekonomi dari awal Orde Baru hingga keruntuhannya.





**R**ADIUS Prawiro tak menyangkal peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam perjalanan kariernya. Berkat Sultan, dia menduduki pejabat setara menteri Pemeriksa Keuangan Agung Muda/anggota pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI, dulu disingkat BAPEKA) dalam Kabinet Dwikora I (2 September 1964 - 21 Februari 1966).

“Sultan mau saya,” kenang Radius.

Radius adalah orang kepercayaan Sultan, yang menjabat Menteri/Ketua BAPEKA yang berkedudukan sebagai menteri koordinator kompartemen. Menurut John Monfries dalam *A Prince in a Republic*, saat itu kader-kader partai politik mengisi posisi strategis di lembaga-lembaga

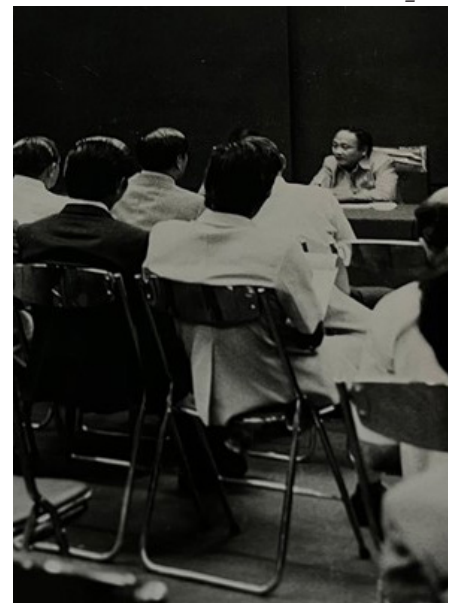
\_01 Menteri Perdagangan Radius Prawiro pada pertemuan dengan pengusaha-pengusaha Asosiasi di Departemen Perdagangan tanggal 22 Januari 1979. (Perpusnas RI)

\_02 Menteri Perdagangan Radius Prawiro bersama Menteri Penerangan Laksamana Madya H. Budiardjo, Letjen Ashari Danudirdjo, dan Sultan Hamengkubuwono IX sedang berdialog di ruang kerja Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Maret 1973. (Perpusnas RI)

\_03 Radius Prawiro meresmikan Persatuan Ekspor Makanan Ternak pada 1 Agustus 1975 di Departemen Perdagangan. (Perpusnas RI)

negara dan pemerintah, termasuk BAPEKA. Karena itulah Sultan membentuk tim ahli di internal BAPEKA berisi orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya dan diandalkan. Salah satunya Radius.

Sultan adalah figur sentral dalam masa transisi kekuasaan. Menyusul Peristiwa Gerakan 30 September 1965, Sultan



kian intens menjalin hubungan dengan para pendukung Orde Baru.

Pada akhir 1965, lanjut Minfries, Sultan secara diam-diam bertemu dengan Widjojo dan para ekonom dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) untuk membicarakan pemulihan ekonomi. Sultan terkesan dengan gagasan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi.

Radius juga mulai bersinggungan dengan para ekonom UI. Ketika FEUI bersama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) cabang FEUI menggelar seminar pada 13 Januari 1966, Radius diundang sebagai salah satu pembicara. Dalam ceramahnya, Radius memberikan gambaran mengenai keadaan ekonomi yang bobrok akibat inflasi.

“Kita telah tahu semua bahwa arus inflasi yang menghebat itu akhirnya bermuara dalam masyarakat yang penuh dengan korupsi dan demoralisasi,” ujarnya. “Korupsi ini menimbulkan pembagian rezeki yang pincang, yang akhirnya mengakibatkan ketidakadilan sosial.”

## Klub Memasak

Kedekatan Radius dengan Sultan berlanjut pada Kabinet Dwikora II (24 Februari sampai 27 Maret 1966). Radius tetap pada posisinya dan berada di bawah koordinasi Sultan yang menjabat Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Radius juga jadi anggota kelompok informal Pitu Up, plesetan dari minuman Seven Up, yang dibentuk secara diam-diam oleh Sultan. Anggota lainnya adalah Dadang Suprayogi, Ashari Danudirjo, Budiardjo, dan Sugih Arto, dan Frans Seda. Surono kemudian

bergabung, sehingga kelompok ini diubah namanya jadi Paguyuban Hasta Mitra.

Hasta Mitra disebut sebagai klub memasak. Setiap bulan secara bergiliran menyiapkan makanan di rumah. Namun pertemuan ini juga dipakai untuk berbagi catatan dan berdiskusi mengenai perkembangan politik-ekonomi.

“Saat itu kita tak tahu siapa kawan, siapa lawan, dan karena itu akan merasa enak bila berada di lingkungan sendiri yang akrab,” catat Dadang Ashari dalam otobiografinya *Antara Tugas dan Hobby*.

Seiring kian penting posisi Sultan, karier Radius juga merangkak naik. Dalam Kabinet Dwikora III (30 Maret sampai 25 Juli 1966), Radius diangkat sebagai Menteri Urusan Bank Sentral/gubernur Bank Sentral.

Radius heran dengan penunjukan dirinya. Biasanya jabatan itu diduduki oleh senior yang sudah berpengalaman. Namun, menurut John Monfries, “karena pengetahuan Hamengku Buwono sebelumnya tentang Radius di BPK, penunjukan itu mungkin muncul atas rekomendasinya.”

Posisi itu membawa Radius kian dekat dengan tokoh-tokoh Orde Baru, khususnya yang bertanggung jawab dalam bidang ekonomi.

Pada Agustus 1966, Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung menggelar Seminar Angkatan Darat II. Untuk bidang ekonomi, Radius Prawiro menjadi salah satu pembicara. Dia menyodorkan topik masalah moneter dalam rangka stabilisasi ekonomi.

Menurut Radius, satu faktor yang menyumbang kemerosotan perekonomian adalah penyelewengan dalam pengelolaan keuangan

negara. Tugas yang dihadapi untuk mengatasi kesulitan sungguh amat berat. Program stabilisasi dan rehabilitasi yang direncanakan pemerintah hanya berhasil jika mendapat pengertian dan dukungan dari masyarakat.

“Karena dalam ekonomi tidak ada *magical short cuts*, ketekunan bekerja dan disiplin masih tetap merupakan ramuan yang terbaik untuk mencapai sukses,” ujar Radius.

Seminar Angkatan Darat II menarik perhatian Jenderal Soeharto, yang sudah mengenal para ekonom itu ketika mengikuti kursus di Seskoad.

Pada 12 September 1966, Soeharto mengangkat kelompok ekonom dari FEUI itu sebagai Staf Pribadi Ketua Presidium Kabinet. Para ekonom itu adalah Widjojo, Ali Wardhana, Mohammad Sadli, Subroto, dan Emil Salim. Karena kebanyakan alumni Universitas Berkeley, secara kelakar mereka kerap disebut “Mafia Berkeley”.

Ketika Soeharto diangkat





\_04 Rapat Teknis Dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Pelita III para Gubernur seluruh Indonesia dibuka oleh Menteri Amir Machmud, Menteri J. B. Sumarlin, Menteri Radius Prawiro, dan Menteri Muda Butanil Arifin di Balai Sidang Senayan pada 14 Juni 1979. (Perpusnas RI)

\_04



sebagai presiden, mereka menjadi Tim Ahli Ekonomi Presiden dengan keanggotaan tim yang diperluas. Radius Prawiro merupakan salah satu anggotanya.

## Tim Ahli Ekonomi

Pada tahun-tahun pertama Orde Baru, kantor Radius Prawiro di Bank Indonesia menjadi tempat bertemu menteri ekonomi dan staf ahli ekonomi untuk merancang perencanaan dan strategi.

“Mungkin karena kantor saya di Bank Indonesia ada AC, atau mungkin juga karena BI punya reputasi baik dalam hal menjaga kerahasiaan,” catat Radius dalam *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi*.

Radius kemudian diangkat sebagai salah satu anggota Tim Ahli Ekonomi Presiden yang dipimpin oleh Widjojo Nitisastro. Pengangkatan didasarkan pada Keputusan Presiden (Kepres) No. 195 Tahun 1968 yang ditetapkan pada 15 Juni 1968.

Soeharto membentuk Tim Ahli Ekonomi bukan tanpa alasan. Dia mewarisi kondisi ekonomi yang carut-marut: hiperinflasi, defisit neraca pembayaran, terkurasnya cadangan devisa, kesulitan membayar utang luar negeri, produksi industri rendah, dan lain-lain.

Tim Ahli Ekonomi, yang juga dikenal sebagai “para teknokrat”, bekerja untuk merumuskan arah kebijakan ekonomi. Peran Tim menjadi lebih kuat setelah perombakan (*reshuffle*) kabinet pada 1971 ketika Widjojo, Subroto, Sadli, dan Emil Salim diangkat sebagai menteri.

Menurut Radius, pertemuan yang diadakan seminggu sekali untuk membahas perencanaan dan strategi berjalan efisien. Hubungan dengan presiden pun terjalin akrab.

“Meskipun bukan ekonom, Soeharto mendengar dengan cermat rekomendasi dari penasihat ekonominya, dan mempelajari pilihan kebijakan ekonomi yang diusulkan,” ujar Radius.

Para teknokrat menekankan pada stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Antara lain mencakup tindakan-tindakan pembaruan fiskal untuk menyeimbangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembaruan moneter, bantuan dan investasi asing, hingga liberalisasi perdagangan luar negeri.

Untuk mencapai hal itu, pemerintah membangun kembali hubungan dengan negara-negara Barat dan Jepang serta blok Timur. Tujuannya untuk menjadwalkan pembayaran utang luar negeri sekaligus mencari pinjaman baru. Tugas ini diserahkan kepada Sultan yang menjabat Menteri Negara Urusan Ekonomi, Keuangan, dan Industri. Radius terlibat di dalamnya. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan terbentuknya Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) pada 1967.

Indonesia juga berupaya mencari pinjaman dari sumber-sumber lain untuk membiayai pembangunan, salah satunya Jepang. Secara khusus, Radius diangkat sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas penyelesaian proyek Wisma Nusantara yang mandek. Dia menjalin kesepakatan dengan Mitsui & Co., Ltd. untuk menyelesaikan pembangunan gedung pencakar langit pertama di Jakarta itu yang berlokasi di Jalan Thamrin.

Program stabilisasi dan rehabilitasi berjalan dengan mulus. Hiperinflasi dapat dijinakkan dan perekonomian Indonesia pulih secara

\_05 Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Perdagangan Radius Prawiro di Gedung DPR/MPR pada 15 Februari 1978. (Perpusnas RI)

\_06 Menteri Perdagangan Radius Prawiro pada pertemuan dengan pengusaha-pengusaha Asosiasi di Departemen Perdagangan tanggal 22 Januari 1979. (Perpusnas RI)

\_07 Pada tanggal 8 Januari 1981 Presiden Soeharto menerima kunjungan Menteri Perdagangan Inggris Mr. John W. Federic Nott diantar oleh Radius Prawiro di Bina Graha. (Perpusnas RI)



\_06



mengesankan. Setelah stabilisasi tercapai, Tim Ahli Ekonomi menyiapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang disiapkan mulai 1 April 1969.

Menurut Radius, di awal kerja-kerja Tim Ahli Ekonomi, tak ada jaminan mengenai kepastian dan kesuksesan program. “Kebijakan yang diambil sangat rumit, dan krisis yang dihadapi sangat parah.

Bekerja di tengah atmosfer yang penuh ketegangan dan kewaspadaan, tim ini bertindak hanya berdasarkan iman bahwa pasar bebas dan kebijakan ekonomi makro yang penuh perhitungan akan mampu mengatasi krisis,” tulis Radius.

“Pada akhirnya, karena kekompakan tim dan memang pada dasarnya strategi yang ditempuh tidak menyalahi prinsip ekonomi rasional, atas pekerjaan tim ini dapat dikatakan berhasil gemilang.”

\_07

## Kembali Mengatasi Krisis

Pada awal 1970-an, tim penasihat ekonomi sebagai pusat pemikiran (*think tank*) tak ada lagi. Sebab, setiap anggota memusatkan perhatian pada tugas khusus yang diembannya. “Hanya kadang-kadang, seperti waktu timbul krisis Pertamina, kelompok itu bertemu...,” ujar Moh Sadli dalam *Pelaku Berkisah*.

Pada 1970-an, Pertamina gagal membayar pinjaman yang jatuh tempo kepada sebuah bank kecil di Amerika. Pemerintah membentuk beberapa tim untuk menangani berbagai





aspek masalah tersebut. Radius ditugaskan untuk menangani utang-utang Pertamina melalui penyewaan kapal tanker milik operator Bruce Rappaport. Radius menjadi terkenal ketika pengadilan di New York memenangkan Pertamina.

“Keputusan tersebut menyelamatkan Indonesia dari kerugian yang sangat besar: utang perusahaan minyak negara itu berdasarkan kontrak Rappaport berkurang dari US\$1,55 miliar menjadi US\$150 juta,” catat Soedradjad Djiwandono dalam “A team player technocrat: Radius Prawiro, 1928–2005”, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 41, No. 2, 2005.

Namun, utang luar negeri Pertamina ternyata jauh lebih besar, yakni US\$10,5 miliar. Pertamina bukan hanya nyaris bangkrut tapi juga membebani keuangan negara. Krisis Pertamina akhirnya diselesaikan melalui proses yang sulit dan mahal.

“Kemampuan para teknokrat menyelesaikan krisis Pertamina, walaupun memberatkan kas negara, yang seharusnya dapat bergelimang uang minyak, memperkuat kepercayaan Presiden Soeharto kepada para teknokrat,” catat Thee Kian Wie dalam pengantar buku *Pelaku Berkisah*.

Thee Kian Wie mencatat keberhasilan lain yang dicapai oleh para teknokrat. Kesuksesan program Keluarga Berencana tak lepas dari peran para teknokrat meyakinkan Soeharto mengenai hubungan antara pertumbuhan penduduk, pembangunan pertanian, peluang kerja, dan kemakmuran. Para teknokrat juga berhasil mengimplementasi program penyesuaian makroekonomi dan pembaruan struktural secara efektif.

Kebijakan ini ditempuh untuk menghadapi memburuknya nilai tukar internasional Indonesia akibat merosotnya harga minyak.

Namun, sejak akhir 1980-an, pengaruh para teknokrat perlahan menurun. Penyebabnya antara lain mundurnya generasi pertama teknokrat, terutama Widjojo, dan naiknya pengaruh “para teknolog” di bawah kepemimpinan Menteri Negara Riset dan Teknologi B.J. Habibie.

## Menteri Kepercayaan

Selama bertahun-tahun, Radius Prawiro ikut merumuskan dan mengawal ekonomi Indonesia dalam posisi sebagai tim ahli ekonomi. Menurutnya, keberhasilan ini tak lepas dari kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Soeharto yang mau mendengarkan rekomendasi dari penasihat ekonominya.

“Setelah melalui pertukaran pikiran yang intensif dan sering kali terjadi revisi yang substansial, barulah beliau memberikan restu final. Setelah itu beliau mendukung kebijakan tersebut secara gigih meskipun harus menghadapi oposan yang keras,” ujarnya.

Bagi para teknokrat, menghadapi Presiden Soeharto yang orang Jawa tidaklah mudah. Ucapan-ucapannya acap bersayap. Menurut Aristides Katoppo dalam biografi *Sumitro Djojohadikusumo: Jejak Perlawanan Begawan Pejuang*, di antara personel tim ahli ekonomi, Widjojo secara kedinasan dan pribadi paling dekat dengan Soeharto.

Sementara yang tahu bagaimana cara mengambil hati adalah Radius. Berkat “kebolehan” itu, Radius sering diminta oleh Widjojo untuk menyampaikan sesuatu kepada Presiden.

“Kelak terbukti, Radius dipakai terus oleh Soeharto.”

Radius memang langganan menjadi menteri. Setelah menjabat Gubernur Bank Indonesia, secara berturut-turut dia diangkat sebagai Menteri Perdagangan (dua periode), Menteri Keuangan, serta Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri dan Pengawasan Pembangunan. Bahkan, setelah pensiun sebagai menteri, tenaga dan pikirannya masih dibutuhkan.

Pada 1993, Radius menjadi anggota Tim Ahli Ekonomi Masalah Hutang dan Pembangunan Negara-negara Berkembang, yang selanjutnya disebut Tim Ahli Ekonomi. Tim yang dipimpin oleh Widjojo ini dibentuk setelah Presiden Soeharto ditunjuk sebagai ketua Gerakan Non-Blok (GNB). Tugasnya merumuskan rekomendasi tentang konsepsi dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memecahkan masalah utang yang melilit negara-negara berkembang, khususnya di Afrika.

Kemudian saat kekuasaan Soeharto berada di ujung tanduk karena krisis moneter, Radius duduk dalam Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK). DPKEK bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program reformasi dan restrukturisasi ekonomi dan keuangan.

Selain sebagai anggota DPKEK, Radius ditunjuk sebagai ketua Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia. Dia dibantu oleh Anthony Salim, Rahmat Gobel, dan The Ning King, tiga pengusaha swasta terkemuka. Namun, belum tuntas tugas Radius, Soeharto keburu lengser.



# 5

## Jurus-Jurus Devaluasi dan Deregulasi

Pada masa Orde Baru, pemerintah berkali-kali menghadapi inflasi dan minimnya penerimaan negara. Sejumlah kebijakan berani harus diambil. Radius Prawiro tak alergi mengeluarkan kebijakan devaluasi dan deregulasi.





\_01 Menteri Keuangan Drs. Radius Prawiro melantik dan mengangkat sumpah 35 orang Direksi dan Dewan Komisaris Bank-Bank Pemerintah dan Badan Usaha Negara Lingkungan Depkeu di Departemen Keuangan pada 23 Desember 1983. (Perpusnas RI)

“Saking kagetnya, seminggu saya tidak pergi ke mana-mana,” kata Radius, dikutip Dawam Rahardjo dalam *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*.

Radius pantas terkejut. Dia tak mendapatkan pemberitahuan sebelumnya. Dia juga tak melobi siapapun. Jabatan itu biasanya juga diduduki oleh senior yang sudah berpengalaman. Namun, pada akhirnya, dia tahu penunjukannya sebagai gubernur BI atas rekomendasi Sultan Hamengku Buwono IX, atasannya di Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA), yang kemudian jadi figur penting di awal Orde Baru.

Radius tak mau berlama-lama menenangkan diri. Dia harus siap untuk menghadapi tugas berat ini di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Di awal menduduki jabatan itu, persoalan pokok yang harus diselesaikannya adalah mengembalikan independensi bank sentral dalam kebijakan moneter. Pada akhir Desember 1966, Radius melakukan penyederhanaan direksi Bank Indonesia (BI). Langkah ini merupakan upaya memisahkan bank sentral dari Bank Negara Indonesia (BNI) unit-unit lain.

“Itu pulalah yang mempermudah dilaksanakannya Undang-Undang Bank Sentral 1968,” ujarnya.

Sebelumnya, Penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965 tentang Pendirian Bank Tunggal Milik Negara mengatur

pengintegrasian bank-bank pemerintah ke dalam bank tunggal, yakni Bank Negara Indonesia (BNI). Dengan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1968, pemerintah menetapkan Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Radius juga melakukan reformasi sistem perbankan yang dipusatkan pada bank sentral. Tujuannya antara lain untuk mengetahui keuangan bank sentral dan bank-bank negara, merekonstruksi catatan-catatan akuntansi yang berlaku surut, terlantar, atau dipalsukan; serta mengungkap pola korupsi.

“Masa enam tahun ketika data keuangan Indonesia tidak diumumkan, merupakan sebuah tabir kebodohan yang menyembunyikan kesalahan-kesalahan yang begini banyak,” tulis Radius Prawiro dalam makalah Seminar BI tahun 2001, dimuat di buku *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir: Buku 3 (1966-1982)*, suntingan Hadi Soesastro dkk.

Kebijakan lain yang diambil Radius di tahun-tahun pertama sebagai gubernur BI, catat M. Dawam Rahardjo, adalah melaksanakan *screening* terkait afiliasi politik, masalah penyelewengan keuangan, dan keterlibatan dengan Partai Komunis Indonesia.

Kemudian, Radius melancarkan Kebijakan 3 Oktober 1966, sebuah kebijakan fiskal dan moneter untuk memerangi inflasi dan menciptakan stabilisasi ekonomi. Inflasi dan keadaan ekonomi yang carut-marut memang menjadi persoalan besar di masa transisi Orde Baru kala itu.

“Dengan inflasi yang melaju lebih dari 650 persen setahun, nilai uang hampir tak ada artinya lagi,” tulis Radius.

\_01

**S**UATU hari di bulan Maret 1966, Radius bersama ayahnya menonton siaran TVRI. Presiden Sukarno sedang mengumumkan nama-nama anggota Kabinet Dwikora III. Radius kaget ketika namanya disebut sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Kebijakan 3 Oktober 1966 berhasil menjaga keseimbangan ekonomi dan menjinakkan inflasi dari 650 persen pada 1966 menjadi 86 persen pada 1968 atau menjelang dimulainya Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I.

Radius juga berupaya menekan jumlah uang yang beredar di masyarakat, penyebab inflasi, dengan mendorong masyarakat untuk menabung. Pada Oktober 1968, pemerintah menggalakkan program tabungan nasional dalam bentuk Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas) dan Tabungan Asuransi Berjangka (Taska). Selain memberikan bunga yang cukup tinggi, pemerintah berupaya menarik minat masyarakat melalui pemberian hadiah undian.

## Pil Pahit Devaluasi

Pada 1971, Amerika Serikat (AS) menghentikan pertukaran dolar dengan emas. Kebijakan ini berdampak pada Indonesia di antaranya menyebabkan laju inflasi naik menjadi 25,8 persen. Situasi tersebut mendorong pemerintah untuk menggulirkan devaluasi, kebijakan menurunkan nilai mata uang rupiah terhadap dolar AS.

Untuk kali pertama dalam sejarah Orde Baru, pemerintah mengambil kebijakan devaluasi pada 23 Agustus 1971. Pemerintah menaikkan harga dolar AS sebesar 12 persen, dari Rp378 menjadi Rp415. Harga dolar AS tersebut bertahan hingga 15 November 1978, paling lama dalam sejarah ekonomi Orde Baru.

Menurut Patmono S.K. dkk. dalam *Radius Prawiro: Kiprah, Peran dan Pemikiran*, kebijakan devaluasi diambil untuk menjaga kurs rupiah agar tetap realistis guna memperkuat daya saing

barang ekspor dan barang substitusi impor.

Devaluasi dilakukan karena nilai rupiah dinilai terlalu tinggi (overvalued) terhadap dolar AS, yang akan merugikan kegiatan ekspor. Ongkos produksi barang ekspor akan melonjak dan dampaknya tak bisa bersaing di pasar internasional. Kebijakan devaluasi diharapkan menstabilkan ekonomi, menyokong kegiatan ekspor, dan merangsang produksi domestik.

Rupanya, ini bukan kebijakan devaluasi yang terakhir. Selama Orde Baru, pemerintah berkali-kali menggulirkan devaluasi. Bahkan, ada ungkapan bahwa “Radius Prawiro agaknya merupakan pejabat yang paling akrab dengan devaluasi.”

Pada 15 November 1978, pemerintah Presiden Soeharto melalui Menteri Keuangan Ali

komoditas pertanian di pasar internasional.

Devaluasi tanggal 15 November 1978 bertujuan untuk mendorong sektor ekspor di Indonesia. Saat itu, pemerintah tidak lagi mematok harga dolar AS pada tingkat tertentu, tetapi membiarkannya hingga mengambang terkendali atau disebut *managed floating exchange rate*. Penerapan sistem ini mengakibatkan nilai tukar rupiah terus mengalami depresiasi (pelemahan) terhadap dolar AS.

Menurut Radius, itu terjadi karena pemerintah tidak memanfaatkan *boom* minyak untuk sektor yang menguntungkan dan tetap mempertahankan nilai tukar rupiah pada Rp415 per dolar.

“Devaluasi ini mengundang kritik yang pedas namun



\_02

Wardhana kembali melakukan devaluasi. Nilai rupiah terhadap dolar AS yang tadinya sebesar Rp415 menjadi Rp625 per dolar atau diturunkan nilainya sebesar 33,6 persen. Kebijakan ini diambil karena kemacetan dalam ekspor nonmigas, paceklik, serta rendahnya harga-harga

pemerintah berpikir bahwa *boom* minyak telah berakhir dan Indonesia menghadapi problema struktural yang serius dalam perekonomiannya,” terang Radius dalam *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi*.

Saat itu, Radius tak sepenuhnya terlibat karena



menjabat di “kavling” lain sebagai Menteri Perdagangan dan Koperasi Indonesia (1973-1983). Ketika Radius menjabat Menteri Keuangan dalam Kabinet Pembangunan IV (1983-1988), giliran Radius yang “terpaksa” menerapkan jurus devaluasi pada 30 Maret 1983.

Saat itu pemerintah menetapkan menurunkan nilai rupiah hingga 48 persen dari Rp702,50 menjadi Rp970 per dolar AS, untuk menyikapi ancaman terhadap devisa negara dan neraca pembayaran luar negeri pada 1982.

Sebenarnya pemerintah berkeinginan melakukan devaluasi pada 1982 namun ditunda karena ada pemilihan umum. Saat itu terdapat kenaikan pengeluaran impor lebih dari US\$7 miliar, padahal penerimaan dari minyak menurun. Keadaan

besar-besaran,” kenang Radius berdalih, dikutip Ilyas Saad dan Irdam Ahmad dalam buku *Kajian Implementasi Kebijakan Trilogi Pembangunan di Indonesia*.

Devaluasi diikuti dengan kebijakan ekonomi lainnya sebagai kelanjutan dari deregulasi dan debirokratisasi yang sudah dimulai pada 1983. Salah satunya kebijakan pencabutan insentif sertifikat ekspor (SE) pada 1986 agar mereka yang memiliki stok menumpuk terdorong untuk segera merealisasikan ekspor.

Setelah devaluasi 1983, pemerintah berjanji takkan lagi melancarkan jurus itu meski terjadi resesi dan deflasi. Tapi janji tinggallah janji.

Pada 12 September 1986, Radius kembali mengumumkan kebijakan devaluasi sebesar 47 persen dari Rp1.134 ke

banyak pihak. Dalam biografinya dia menyebut di masa itu yen Jepang sedang mengalami apresiasi terhadap dolar AS. Sementara, sebagian besar utang luar negeri Indonesia saat itu dalam bentuk yen. Maka, apresiasi yen terhadap dolar AS menyebabkan nilai riil utang luar negeri Indonesia menjadi lebih besar, baik dalam dolar AS maupun rupiah.

APBN mengalami tekanan karena nilai utang Indonesia meningkat menjadi sekitar US\$4 miliar. Akibatnya, *Debt Service Ratio* (DSR) Indonesia meningkat menjadi 33 persen, anggaran untuk membayar utang meningkat. Di sisi lain, harga ekspor minyak menukik hingga di bawah US\$10 (per barel), yang mengancam neraca pembayaran.

Kebijakan devaluasi berdampak positif. Pemerintah

\_02 Gubernur Bank Sentral Drs. Radius Prawiro menerima kunjungan Ketua Paris Club Mr. Danil Dequen di Bank Indonesia pada 27 Maret 1972. (Perpusnas RI)

\_03 Memperindag Radius Prawiro di dampingi Menpen Sumarlin dalam acara komperensi pers mengenai pembatalan kontrak pembelian tengker-tengker pertanian, 11 Agustus 1977. (Khastara Perpusnas RI)



\_03

ini membahayakan posisi cadangan devisa dan neraca pembayaran luar negeri. Radius harus menanggungnya.

“Jalan yang paling tepat untuk mengatasi keadaan itu adalah melakukan devaluasi karena harga dolar akan naik sehingga mengurangi nafsu orang untuk mengimpor

Rp1.664 per dolar AS. Kebijakan devaluasi ini juga disertai dengan perubahan sistem kurs, dari kurs tetap menjadi kurs mengambang terkendali. Dengan sistem baru ini, kurs bisa bergerak bebas sesuai batas-batas yang telah ditetapkan oleh Bank Sentral.

Radius menyadari keputusan devaluasi 1986 dipertanyakan

berhasil mengendalikan laju inflasi. Pada 1986, laju inflasi hanya 5,9 persen, tahun berikutnya naik menjadi 9,1 persen, kemudian pada 1988 turun menjadi 5,8 persen lalu naik kembali ke level 6,0 persen pada 1989.

“Keberhasilan menjaga laju inflasi rata-rata di bawah 7



persen setelah devaluasi sebesar itu merupakan hal luar biasa,” ujar Radius.

Devaluasi 1986 juga menyebabkan penyediaan rupiah untuk membayar utang luar negeri naik sebesar 45 persen. “Manfaat positif dari devaluasi yang bisa dirasakan langsung hanyalah pulangnya modal yang sempat lari ke luar negeri selama ini,” ujar pengamat ekonomi M. Sadli, dikutip Patmono S.K. dkk.

Sialnya, kebijakan itu juga menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia. Nilai ekspor minyak terus menurun dari 66,8 persen ke 50,9 persen. Seiring dengan itu, *rush* pun terjadi di kalangan masyarakat yang menguras tabungan, menukarkannya ke mata uang asing, lalu memindahkannya ke bank-bank luar negeri.

Saat itu Radius sudah digeser dari jabatan Menkeu menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri

(Menko Ekuin). Presiden Soeharto menunjuk Johannes Baptista (JB) Sumarlin sebagai *ad interim* Menteri Keuangan menggantikan Radius. Sumarlin mengatasi kisruh akibat devaluasi dengan mengeluarkan surat perintah kepada bank-bank BUMN untuk membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

### Paket Deregulasi

Devaluasi hanyalah salah satu kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi minimnya devisa negara akibat turunnya harga minyak. Sementara itu pemerintah kelimpungan mencari cara untuk menghadirkan devisa negara dari sektor baru selain migas.

Pada situasi seperti ini, Menteri Keuangan Radius Prawiro dan penasihat ekonomi presiden Widjojo Nitisastro mengadakan pertemuan pada tahun 1983. Radius Prawiro menyebut pertemuan itu

dikhususkan untuk mencari resep membangkitkan gairah ekonomi, khususnya sektor perbankan nasional usai periode yang disebut *boom* minyak ini selesai. Tercetuslah ide pemberian kebebasan kepada sektor perbankan lewat serangkaian paket deregulasi – yang dinilai banyak pihak sebagai liberalisasi.

Proses deregulasi dimulai pada tahun 1983 lewat kebijakan Paket 1 Juni 1983 (Pakjun ’83), ketika Radius menjabat sebagai Menteri Keuangan. Kebijakan ini membebaskan bank-bank untuk menentukan suku bunga sendiri.

Paket deregulasi perbankan yang lebih substansial diperkenalkan pada 27 Oktober 1988 lewat kebijakan Paket Oktober 1988 (Pakto ’88) saat Radius menjabat Menko Ekuin. Pada intinya Pakto 88 merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru.





\_04

Pakto '88 berjalan baik. Seperti yang diharapkan, bank-bank swasta tumbuh dengan pesat. Dana masyarakat pun bisa mengalir. Namun, kebijakan ini justru jadi bom waktu. Karena lemahnya manajemen, banyak bank yang “sakit” dan melimpahkan masalah tersebut kepada pemerintah. Nasabah yang panik menarik uang secara besar-besaran. Masalah itu mencapai puncaknya pada 1997 saat badai krisis moneter menerjang.

Menurut J. Soedradjad Djiwandono dalam “A team player technocrat: Radius Prawiro, 1928–2005”, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 41, No. 2, 2005, pengalaman Radius sebagai menteri perdagangan juga membuatnya tertarik untuk mengatasi maraknya hambatan yang ditimbulkan kebijakan terhadap persaingan dan perdagangan dalam negeri. Ketika menjabat Menko Ekuin, kantornya

mensponsori beberapa seminar tentang persaingan dalam negeri.

“Bahkan, komitmennya untuk mendorong liberalisasi perdagangan begitu kuat sehingga, sebagai menteri muda perdagangan selama masa jabatannya, saya menerima teguran bersahabat darinya karena secara terbuka menyatakan bahwa deregulasi bukanlah tujuan kami, tetapi hanya sarana untuk mencapai efisiensi pasar yang lebih besar. Ia mengingatkan saya bahwa pernyataan itu dapat dianggap sebagai antideregulasi,” catat Djiwandono.

Djiwandono menambahkan, dalam pembuatan kebijakan ekonomi, Radius adalah seorang yang percaya pada fleksibilitas, menyadari dinamika tantangan yang dihadapi ekonomi nasional. Hal ini tercermin dalam subjudul bukunya: “Pragmatisme dalam Aksi”. Namun, pragmatisme ini harus diimbangi dengan komitmen yang kuat terhadap

---

\_04 Memperindag Radius Prawiro didampingi Menpen Sumarlin dalam acara konferensi pers mengenai pembatalan kontrak pembelian tengker-tengker pertanian, 11 Agustus 1977. (Khastara Perpusnas RI)

prinsip-prinsip ekonomi makro dan mikro yang baik.

“Dan, mungkin karena penugasan awalnya sebagai kepala bank sentral, ia percaya pada peran penting kebijakan moneter dalam memengaruhi pembangunan ekonomi,” catat Djiwandono.

Sebagai seorang nasionalis dan bankir sentral, Radius juga percaya bahwa sektor moneter dan keuangan yang dikelola dengan baik akan mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, membantu memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

# 6

## Mengampu Ekonomi Masyarakat Desa

Radius Prawiro memberi perhatian pada nasib petani dan koperasi. Menggalakkan swasembada beras, menata koperasi, hingga menyediakan kredit bagi petani dan masyarakat desa.





**R**ADIUS Prawiro punya perumpamaan yang menarik mengenai

swasembada. Dia menyebut misi swasembada beras bagi Indonesia serupa dengan misi Apollo ke bulan bagi Amerika Serikat. Butuh proses panjang dan biaya yang besar.

“Swasembada beras relatif mudah untuk direncanakan namun jauh lebih rumit dan sukar untuk dicapai,” catat Radius Prawiro dalam *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi*.

Swasembada beras sudah diupayakan sejak 1950-an. Beberapa program digulirkan tapi gagal mencapai sasaran. Pemerintah Orde Baru melanjutkan upaya swasembada beras dengan beragam alasan.

“Hal yang terutama, beras adalah makanan pokok bagi orang Indonesia. Pemerintah sering menganjurkan masyarakat untuk memakan bahan makanan lain seperti roti, jagung, sagu, singkong, dan bahkan beras imitasi yang terbuat dari tepung terigu. Namun, rakyat tidak menyukainya,” ungkap Radius.

Ketersediaan beras selalu menjadi fokus kabinet. Pada Mei 1967, pemerintah membentuk Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai pengganti Komando Logistik Nasional (Kolognas) yang berfungsi sebagai agen pembeli beras tunggal. Bulog juga bertugas memperkuat ketahanan pangan, memastikan pasokan beras senantiasa tersedia, dan menjaga stabilitas harga beras.

Peran Bulog sangat sentral. “Kelangkaan beras merupakan pengalaman menakutkan bagi orang Indonesia, seolah-olah langit akan runtuh,” kata Radius.

Namun, hal itulah yang dialami pemerintah. Indonesia pernah mengalami kekurangan beras dalam kurun 1969 hingga 1982. Yang paling parah terjadi pada 1972, menyebabkan harga meningkat lebih dari 100 persen.

Untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri, pemerintah harus mengimpor dari negara lain. Beberapa kali Radius mendapat penugasan. Pada 1968, sebagai Gubernur Bank Sentral, dia berangkat ke Mesir untuk mengamankan kontrak-kontrak beras dan menetapkan dasar-dasar kebijakan di masa mendatang. Kemudian, pada 1970-an, Radius Prawiro sebagai Menteri Perdagangan mendapat tugas khusus untuk mencari beras ke Bangkok dan Tokyo.

“Pengalaman keterlambatan impor Bulog tahun lalu rupanya membuat Kabinet siang-siang bergegas mengisi kekurangan stok nasional dari luar negeri,” catat *Tempo*, 23 Juni 1973.

## Dari Kredit Hingga Pupuk

Untuk mencapai swasembada beras, pemerintah menggelar program intensifikasi produksi padi dengan nama Bimbingan Massal (Bimas) secara nasional sejak 1965/1966. Sebagai akibat keterbatasan devisa negara, pemerintah memperkenalkan sistem Bimas Gotong Royong (Bimas GR) pada 1968/1969.



\_01

\_01 Menteri Perdagangan Drs. Radius Prawiro membuka pertemuan Asosiasi Kopi Asean di Hotel Sari Pasifik tanggal 14 Oktober 1980. (Perpusnas RI)

\_02 Presiden Soeharto menerima Menteri Perdagangan dan Koperasi Radius Prawiro dan menteri-menteri lain pada tanggal 2 Desember 1978 di Bina Graha. (Perpusnas RI)



\_02



\_03

Program ini merupakan kerja sama antara pemerintah dan perusahaan swasta asing, terutama dalam penyediaan dana.

Pada musim tanam 1969, Radius sebagai Gubernur BI bersama Sri Paku Alam dan Sudarsono Hadisapoetro, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, mengadakan Pilot Proyek Unit Desa BRI di Yogyakarta berkenaan dengan aspek perkreditan. Fokusnya pada perbaikan pelaksanaan Bimbingan Massal (Bimas) yang disempurnakan dengan Unit Desa. Kegiatan-kegiatannya meliputi percontohan, penyuluhan, penyaluran saprodi, perkreditan, dan pemasaran yang semuanya tidak ditangani oleh satu badan.

Radius sebagai Gubernur BI, berperan dalam penerapan penyaluran kredit kepada petani padi berupa bibit unggul, sarana produksi pupuk, serta biaya hidup. Jika panen berhasil, petani mengembalikan kredit, tapi jika gagal tak perlu membayar utang. Ternyata pilot proyek ini berhasil dengan baik.

Dalam pertemuan dengan Presiden Soeharto di Istana Negara, Radius menceritakan kisah sukses apa yang disebut “Bimas yang Disempurnakan” di Yogyakarta. Radius mengatakan, kunci keberhasilan Bimas adalah bibit unggul, sarana produksi, serta penetapan harga dasar gabah untuk menghindarkan petani dari penimbunan dan ijon.

Menurut Patmono dalam biografi *Radius Prawiro: Kiprah, Peran, dan Pemikiran*, hasil pilot proyek tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah sebagai landasan pelaksanaan Bimas Nasional yang Disempurnakan dan mulai dilaksanakan sejak musim tanam 1970. Sejak itu, produksi padi meningkat dari tahun ke tahun.

Selain itu, percobaan di Yogyakarta juga berhasil mendekatkan pelayanan kredit BRI kepada para petani langsung tanpa melalui Koperasi Pertanian (Koperta). BRI kemudian mengembangkan sistem perbankan mikro untuk menyediakan kredit bersubsidi bagi petani padi melalui Bimas.

“Setelah percobaan di D.I. Yogyakarta dinilai berhasil,



\_03 Presiden Soeharto didampingi Menteri Radius Prawiro Menteri M. Jusuf, Menteri Sri Sultan Hamengkubuwono dan Menteri Sumitro untuk meninjau Bulog pada 7 Agustus 1969. (Perpusnas RI)

\_04 Menteri Perdagangan Drs. Radius Prawiro mendampingi Presiden Soeharto menerima kunjungan Justin Rarivoson di Bina Graha pada tanggal 5 Juni 1980. (Perpusnas RI)



\_04

maka selanjutnya BUUD/KUD dikembangkan di daerah-daerah lain,” catat buku *Induk KUD dalam Lintasan Sejarah Gerakan Koperasi Indonesia, 1979-1994*.

Untuk memperkuat kehadiran Badan Usaha Unit Desa (BUUD) atau Koperasi Unit Desa (KUD), pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1973 tentang Unit Desa. Dengan Inpres ini, koperasi-koperasi yang berdiri di suatu wilayah unit desa dilebur menjadi BUUD atau KUD. Peleburan koperasi-koperasi menjadi satu KUD dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah dalam mengatur KUD dan menyelaraskan program pemerintah lainnya.

Sejak itu, ribuan KUD didirikan di tingkat kecamatan di seluruh negeri. Kantor cabang BRI berfungsi terutama sebagai agen penyalur untuk Bimas dan program pinjaman pedesaan bersubsidi lainnya.

Pada 1973, Radius Prawiro diangkat sebagai Menteri Perdagangan dalam Kabinet Pembangunan II. Salah satu tugas khusus yang dibebankan kepada Radius adalah menangani

penyaluran pupuk kepada petani.

“Semua saya terima petunjuk (dari Presiden) itu sebagai petunjuk yang sederhana dan wajar-wajar saja. Baru kemudian setelah menjalani tugas sebagai Menteri Perdagangan, terasa strategisnya pupuk itu dalam usaha produksi pangan,” tulis Radius dalam buku *Di Antara Para Sahabat Pak Harto 70 Tahun* yang dihimpun G. Dwipayana dan Nazaruddin Syamsuddin.

Radius berperan besar dalam meletakkan dasar-dasar mekanisme distribusi pupuk yang lebih mampu mengantisipasi kebutuhan petani. Penanganan penyaluran pupuk kepada petani perlu diatur sebaik-baiknya karena dari tahun ke tahun jumlahnya meningkat.

Salah satu kebijakan yang diambil adalah memberikan kesempatan kepada swasta untuk turut serta dalam pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani dengan harga sama dengan yang diberikan kepada peserta Bimas. Pengecer swasta juga diberi kesempatan untuk menjual pupuk kepada petani Bimas atau Intensifikasi Massal (Inmas) jika BUUD atau KUD di

daerah tersebut tidak berjalan.

Keputusan ini mengurangi hambatan birokrasi. Penyaluran pupuk kepada petani menjadi lebih lancar dan menjangkau wilayah yang lebih luas.

Sempat muncul sinyalemen adanya penjualan pupuk di atas harga yang ditentukan. Dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 3 Desember 1975, Radius menegaskan kami ingin tahu siapa yang menjual. Sebab, penjualan pupuk sudah diatur dengan suatu pengawasan dan penyalur wajib menaatinya. Bahkan Radius tak segan meminta nama penyalur, di mana, dan kapan kejadiannya.

“Soal-soal seperti ini bisa dilaporkan melalui Kantor Wilayah atau langsung ke Departemen Perdagangan,” ujar Radius, dikutip *Parlementaria* No. 68 tahun 1976.

## Menggalakkan Koperasi

Pada 1978, Radius Prawiro tetap menjabat Menteri Perdagangan dalam Kabinet Pembangunan III. Bedanya, kali ini dia mendapat limpahan wewenang urusan koperasi yang sebelumnya berada dalam



\_05 Menteri Perdagangan Drs. Radius Prawiro membuka Panel Diskusi “Meningkatkan Usaha untuk Memasyarakatkan Koperasi” yang bekerja sama dengan Ditjen Koperasi pada 12 Juni 1980. (Perpusnas RI).

\_06 Menteri Perdagangan Drs. Radius Prawiro menutup Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Departemen Perdagangan I (SESPA I) di APN Slipi Jakarta pada 12 Desember 1974. (Perpusnas RI)

Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi.

Tentu Radius tidak sendirian. Dia didampingi oleh Bustanil Arifin sebagai Menteri Muda Urusan Koperasi merangkap Kepala Bulog dalam menyusun kebijakan-kebijakannya terkait penggenjotan produksi pertanian menuju swasembada.

Demi kelancaran distribusi pupuk yang dibutuhkan untuk swasembada beras, Radius merombak KUD. Sebelumnya, selama bertahun-tahun, petani mesti membeli pupuk dua kali lipat dari HET (harga eceran tertinggi). Penyebabnya adalah kelangkaan pupuk akibat birokrasi panjang yang mempersulit KUD penyalur dan KUD pengecer di beberapa daerah.

Lini III, lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah kota/kabupaten, mengalami kesulitan untuk berkoordinasi dengan 3.500 KUD dalam menetapkan jumlah kebutuhan pupuk yang diperlukan petani. Parahnya lagi, Lini III kerap jadi sasaran rebutan enam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di 27 provinsi, Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) di 11 provinsi, dan 37 perusahaan swasta di 11 provinsi.

“Untuk itulah peran KUD dalam distribusi pupuk perlu ditingkatkan karena sebagian besar anggota KUD adalah petani sekaligus pengguna pupuk di lini terakhir,” kata Radius.

Radius menekankan perombakan birokrasi, pemberian subsidi pupuk, hingga pelibatan petani dalam pengelolaan KUD secara bertahap. Gudang-gudang dan sarana produksi pertanian dibangun di desa-desa. Juga memperbaiki dan membuat jalan-jalan, meningkatkan sarana transportasi, serta menata sistem kerja yang lebih efisien.

Bersamaan dengan itu, berjalan pula program Intensifikasi Khusus (Insus) sebagai bentuk implementasi Bimas. Program Insus

dilaksanakan oleh sekelompok petani untuk memanfaatkan potensi lahan sawah secara optimal. Penyaluran pupuk melalui KUD dilakukan untuk menyukseskan program tersebut. Demi pembinaan KUD, pemerintah memberi kesempatan kepada KUD untuk membeli pupuk langsung dari Lini III dengan jumlah terbatas (kurang lebih 10 ton) secara tunai. Di samping itu, dilakukan pula penyediaan input, pendidikan petani, penyediaan prasarana, strategi pemasaran, dan kebijakan harga.

Berkat duet Radius dan Bustanil, KUD tumbuh dan berkembang pesat. Setelah melalui perombakan, KUD dapat menjangkau seluruh sendi-sendi kehidupan rakyat. Mulai sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga simpan-pinjam.

Sepanjang 1970-an sampai 1980-an, pemerintah juga melakukan investasi besar-besaran untuk membangun infrastruktur pertanian seperti waduk, bendungan, dan irigasi dengan tujuan meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Hasilnya, produksi padi berhasil naik dari tahun ke tahun dan akhirnya swasembada beras tercapai pada 1984.





## Pemberdayaan Masyarakat

Ketika Radius Prawiro ditunjuk sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Pembangunan IV (1983-1988), perhatiannya pada nasib petani tak menurun. Radius mengupayakan pemberdayaan petani dan masyarakat pedesaan dengan program Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dan Simpanan Pedesaan (Simpedes).

Awalnya, kredit sektor pertanian itu ditujukan untuk menunjang pelaksanaan program intensifikasi padi. Pada 1985, Kredit Bimas dihentikan dan digantikan dengan Kredit Usaha Tani (KUT) sebagai bentuk penyempurnaannya, yang disalurkan melalui KUD. Cakupan budidaya komoditasnya pun menjadi lebih luas hingga merambah palawija dan hortikultura.

Bagi petani yang memerlukan KUT untuk tanaman padi dan palawija disediakan lewat KUD. Sedangkan bagi petani yang tidak memperoleh fasilitas KUT disediakan fasilitas kredit seperti Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), serta Kredit

Modal Kerja (KMK) melalui BRI Unit Desa.

Program Kupedes, yang dimulai tahun 1984, merupakan kredit umum bagi masyarakat pedesaan yang ditawarkan dengan tingkat suku bunga komersial. Program tersebut menyediakan kredit hingga Rp2 juta dengan tingkat bunga flat 1,5 persen per bulan.

Program Kupedes diperuntukkan perorangan, bukan kelompok. Sukses mencapai sasaran menyuplai permintaan kredit usaha produktif di pedesaan, memungkinkan sistem BRI Unit Desa bertahan dalam jangka waktu yang panjang.

Dalam kaitannya dengan program intensifikasi beras, Kupedes memberi peluang kepada petani untuk kegiatan usaha tani (beras) dengan cara kredit tunai yang bisa dipakai untuk pembelian sarana produksi. Hingga Desember 1986, 28 persen dari kredit *outstanding* Kupedes dipergunakan untuk kegiatan pertanian. Namun, penduduk pedesaan yang melakukan berbagai kegiatan, misalnya perdagangan dan industri kecil, juga menggunakan kredit modal

kerja untuk kegiatan sektor pertanian.

“Selama periode 1984-1986, BRI telah berubah menjadi sistem perbankan yang menguntungkan, yang menyediakan jasa perbankan bagi penduduk pedesaan di Indonesia,” catat Patmono.

Selanjutnya, pada November 1984 program Simpedes diperkenalkan sebagai proyek pilot dan diluncurkan secara nasional pada 1986. Simpedes memberi bunga 12 persen dari saldo tabungan, tergantung jumlahnya.

“Yang membuatnya menarik, dalam Simpedes, penabung diperkenankan untuk menarik uang dengan frekuensi tak terbatas,” kata Radius.

Tak ayal Simpedes berangsur-angsur populer di masyarakat pedesaan. Terlebih, lanjut Radius, dengan adanya insentif tambahan dan undian berhadiah per enam bulan.

Program Kupedes dan Simpedes terus berjalan meski Radius sudah beralih menjabat Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan (Ekuin-PP) dalam Kabinet Pembangunan V (1988-1993).



7

## Jejak Reformasi Pajak

Penerimaan negara dari minyak dan gas turun, pemerintah beralih ke pajak yang semula kurang digarap. Radius Prawiro membuat gebrakan dengan melakukan reformasi perpajakan.





**B**ELUM genap setahun menjabat Menteri Keuangan dalam Kabinet Pembangunan IV (1983-1988), Radius Prawiro menghadapi tantangan yang tak mudah. Penerimaan negara dari minyak bumi dan gas alam (migas) turun seiring anjloknya harga migas di pasaran dunia. Pemerintah pun harus menggali sumber pendapatan lain. Pilihan jatuh pada sektor pajak.

Menurut Bambang Subandrijo dalam *Pernak-pernik Perjalanan Sejarah Radius Prawiro*, ketika hendak memangku jabatan menteri keuangan, Radius Prawiro menyatakan kesediaannya kepada Presiden Soeharto untuk menjalankan dua tugas utama: reformasi perpajakan dan kepabeanan.



“Ia segera menyelesaikan draft undang-undang perpajakan yang baru yang sudah dirintis beberapa tahun sebelumnya oleh Menteri Keuangan Ali Wardhana,” tulis Bambang.

Tak tanggung-tanggung, pemerintah menyiapkan

---

\_01 Radius Prawiro membuka Seminar Standarisasi dan Pengawasan Mutu IV di Gedung YTKI pada 29 Mei 1978. (Perpusnas RI)

\_01



tiga rancangan undang-undang (RUU) Perpajakan. Setelah rampung, Radius Prawiro mewakili pemerintah menyampaikan ketiga RUU tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Setelah pembahasan di DPR, paket Undang-Undang (UU) Perpajakan disahkan pada akhir 1983. Terdiri dari UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; serta UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang-barang Mewah (PPN dan PPnBM).

Reformasi perpajakan pun dimulai.

Radius Prawiro, Menteri Keuangan merangkap sebagai Direktur Jenderal Pajak, menggalakkan pentingnya pajak sebagai penerimaan negara. Dia tak sungkan-sungkan memberikan wejangan kepada para pemungut pajak agar tak lagi “berburu di kandang binatang” melainkan mencari yang belum rela membayar pajak. Yang bayar pajak dijaga dengan pelayanan yang baik dan memuaskan agar menjadi pembayar pajak yang taat, setia, dan jujur.

Bahkan, saat berpidato di depan para petugas Direktorat Jenderal Pajak, Radius mengutip

isi buku *Bagus Sriman Cari Ilmu* karya Bakti, putranya. Kutipan itu sendiri menyalin bait *Serat Wulangreh* pupuh Megatruh yang ditulis oleh Susuhunan Pakubuwana IV, raja Surakarta.

“Bila tak ikhlas, lebih baik menganggur saja, tidak usah mengabdikan diri. Bebas semuanya ....”

## Pentingnya Reformasi Perpajakan

Pajak sudah berperan penting sebagai sumber pendapatan negara sejak setelah perang kemerdekaan. Pada 1951, pajak ekspor mendominasi penerimaan negara hingga mencapai 54 persen. Berikutnya, pajak impor mengambil alih dominasi tersebut.

Pada awal pemerintahan Orde Baru pun pajak masih

---

\_02 Radius Prawiro membuka rapat kerja Departemen Perdagangan dan Koperasi di PUSDIKOP pada 26 Maret 1979. (Perpusnas RI)





mengambil porsi terbesar dalam penerimaan negara. Namun, penerimaan dari pajak makin lama makin berkurang dan tergeser oleh penerimaan dari minyak dan gas (migas) yang *booming* pada kurun 1973 hingga 1982. Pemerintah pun bersikap longgar terhadap penerimaan yang bersumber dari pajak.

“Mau bayar pajak, syukur, kalau tidak, ya tidak apa-apa. Mungkin karena pada waktu itu kita sedang bergelimang uang dari minyak,” kata Radius Prawiro dalam biografinya *Kiprah, Peran, dan Pemikiran*.

Anjloknya harga migas mendorong pemerintah mencari sumber pendapatan lain. Pada 1981, Menteri Keuangan Ali Wardhana menggandeng konsultan dari Harvard Institute for International

Development untuk menyusun langkah antisipatif dalam mengoptimalkan penerimaan negara selain dari migas. Semuanya diformulasikan dalam wujud reformasi pajak.

Namun, hal tersebut dibantah oleh Radius Prawiro, yang menggantikan Wardhana.

“Tidak betul itu. RUU Perpajakan ini, yang membuatnya adalah tim kita sendiri, dipimpin oleh Dirjen Pajak,” ujarnya kepada majalah *Tempo* edisi: 38/13, 19 November 1983.

Setelah bekerja keras selama enam bulan, hasilnya dibicarakan lagi oleh tim Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) Ali Wardhana, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua

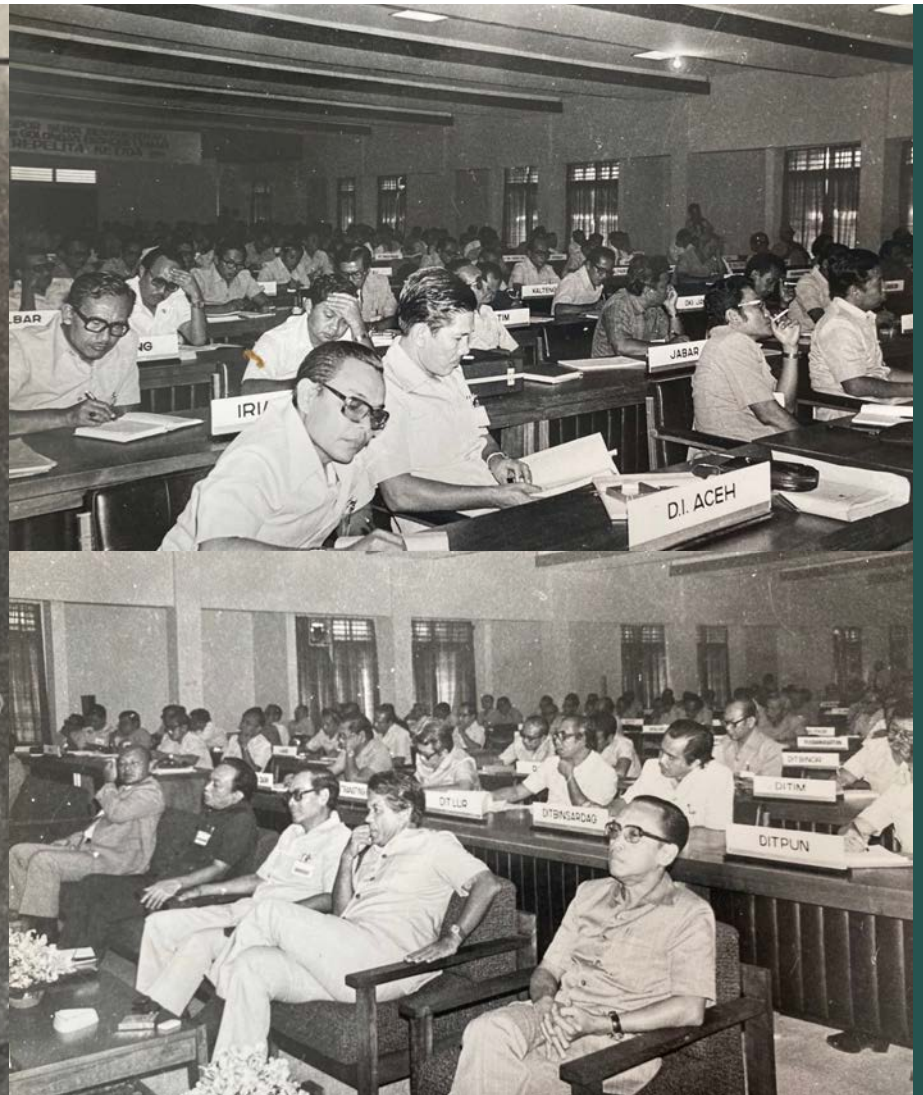
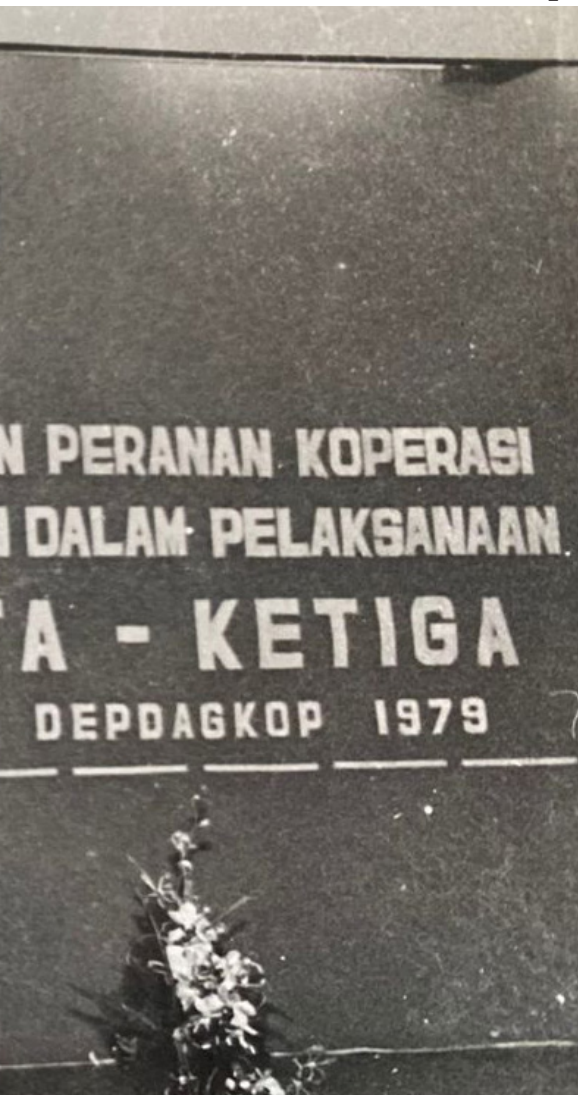
Bappenas JB Sumarlin, Menteri Muda/Sekretaris Kabinet Moerdiono, dan Menteri Keuangan Radius Prawiro.

“Pak Widjojo [Nitisastro] juga ikut terus karena beliau dari dulu amat prihatin tentang perpajakan. Kemudian, kita bicarakan lagi dalam forum yang lebih luas, dengan para menteri lainnya,” ujar Radius.

Kendati demikian, Radius membenarkan tim Harvard melakukan penelitian tentang sistem perpajakan yang baru.

“Itu benar. Departemen Keuangan banyak meminta pendapat dari luar negeri. Maksudnya, agar kita tidak mengulang kesalahan yang pernah dibuat oleh negara lain, terutama negara berkembang, yang telah memraktekkan sistem perpajakan serupa,” ungkapnya.

\_02





\_03

\_03 Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Perdagangan Radius Prawiro di Gedung DPR pada 8 Juni 1978. (Perpusnas RI)

\_04 Sidang stabilisasi ekonomi Kabinet Pembangunan II yang dibuka oleh Presiden Soeharto dan Menteri Radius Prawiro di Bina Graha pada 7 Februari 1975. (Perpusnas RI)



\_04

Rencana pemerintah untuk melakukan pembaruan perpajakan disampaikan Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan di depan sidang DPR pada 16 Agustus 1983. Presiden mengatakan, sebelum pelaksanaan Repelita IV dimulai, pemerintah akan mengajukan beberapa RUU perpajakan nasional. Tujuan utamanya untuk lebih menegakkan kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar migas.

Dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 5 November 1983, Radius menjelaskan bahwa sebagian besar UU Perpajakan yang berlaku merupakan warisan kolonial. Misalnya Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925, Ordonansi Pajak Kekayaan

Tahun 1932, dan Ordonansi Pajak Pendapatan Tahun 1944.

Perubahan, penambahan, dan penyesuaian dilakukan pada tahun 1967 dan 1970. Namun, perubahan tersebut masih belum memenuhi aspirasi rakyat dan kebutuhan pembangunan nasional. Karena itulah diperlukan pembaruan sistem perpajakan.

“Hal ini disebabkan karena perubahan, tambahan dan penyesuaian yang dilakukan bersifat penyempurnaan saja, sedangkan sistem intinya masih berlandaskan pada falsafah dan tata cara pemungutan pajak warisan zaman kolonial,” tutur Radius.

## Lima Undang Undang

Mengutip buku *Radius Prawiro: Kiprah, Peran, dan Pemikiran*, reformasi perpajakan diperlukan karena sistem dan

peraturan perpajakan telah usang dan tidak efisien. Ada banyak titik lemah yang dapat menjadi celah untuk menghindari pajak sehingga berpotensi merugikan negara.

Di samping itu, penerimaan negara dari pajak sangat bergantung pada pajak perusahaan-perusahaan minyak bumi atau pemungutan pajak lebih diarahkan kepada perusahaan besar. Dalam sistem perpajakan yang baru, pemerintah menjangkir pembayar pajak seluas-luasnya. Seiring bertambahnya jumlah orang kaya dan perusahaan yang mampu membayar pajak.

Dalam upaya meningkatkan jumlah pembayar pajak, pemerintah memilih perluasan basis pembayar pajak, bukan peningkatan tarif, serta menyederhanakan dan menurunkan tarif pajak.

“Dengan perubahan perpajakan nasional itu diusahakan tersusunlah sistem perpajakan yang berintikan kesederhanaan, menunjang pemerataan, dan memberikan kepastian. Kesederhanaan tersebut diperlukan agar mudah untuk dilaksanakan dan dimengerti baik oleh petugas pajak maupun oleh wajib pajak,” ujar Radius di depan DPR.

Reformasi perpajakan dimulai dengan tiga UU yang disahkan pada 1983. Untuk mengawali penerapan paket UU perpajakan baru tersebut, pemerintah meluncurkan kebijakan pengampunan pajak pada April 1984.

Reformasi pajak berlanjut dengan lahirnya UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Khusus untuk yang disebut terakhir, ketika pembahasan, hampir semua



fraksi di DPR menentang. Alasannya belum perlu dan memberatkan rakyat.

Radius kemudian melakukan pendekatan kepada fraksi-fraksi di DPR. Dia menerangkan pentingnya UU ini untuk menambah pendapatan pemerintah daerah yang bertanggungjawab atas pemeliharaan dan pembangunan wilayahnya. Pembagian hasil PBB 90 persen untuk daerah dan 10 persen untuk pemerintah pusat. Menteri Sekretaris Negara Sudharmono juga ikut meyakinkan anggota-anggota DPR. Akhirnya semua fraksi dapat menerima. UU Pajak Bumi dan Bangunan pun disahkan.

“Sejak itu, ada lima UU Perpajakan yang terdiri dari 156 pasal dan hanya mengenal 9 macam tarif. Sebelumnya, kita memiliki 13 UU warisan kolonial dengan 575 pasal dan mengenal 262 macam komponen tarif,” terang Radius.

Presiden Soeharto menyebut lima UU Perpajakan yang baru sebagai momentum nasional.

## Faktor Penentu

Salah satu perubahan penting dalam UU pajak yang baru adalah penerapan asas *self assessment*. Dengan asas tersebut, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Setiap wajib pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, jujur, lengkap, dan jelas. Kemudian wajib pajak melaporkan SPT tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak yang berada di wilayah domisilinya.

“Untuk itu, undang-undang telah mengatur suatu mekanisme kontrol berikut sanksi-sanksi yang cukup berat bagi mereka yang tidak jujur memenuhi

kewajiban pajaknya, yang berarti melanggar hukum dan prinsip-prinsip keadilan,” tulis Radius.

Setelah lima UU perpajakan yang baru diberlakukan pada awal 1984 dan awal 1986, pemerintah gencar melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan aparat pajak. Dalam berbagai kesempatan, Radius selalu mengingatkan bahwa berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembaruan sistem perpajakan ditentukan oleh empat faktor.

Keempat faktor itu terdiri dari sistem perpajakan, baik menyangkut perangkat undang-undang dan peraturan maupun aparat pelaksanaannya; sistem penunjang antara lain sistem pembukuan, akuntansi, dan profesionalisme; faktor eksternal berupa faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik; serta masyarakat khususnya wajib pajak, termasuk di dalamnya sistem informasi dalam arti yang seluas-luasnya, tingkat kesadaran dan kepatuhan.

Keempat faktor penentu tersebut saling menunjang dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Misalnya, perangkat peraturan yang sudah baik tidak mungkin berjalan bila aparat pelaksanaannya enggan melaksanakan. Demikian pula perangkat dan aparat pelaksana yang sudah baik tidak akan menjamin peningkatan wajib pajak bila tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta faktor-faktor eksternal tidak mendukung.

Radius mengakui dalam pelaksanaan sistem perpajakan yang baru, muncul sikap skeptis dan apriori dari masyarakat.

“Dengan arif, kesabaran, telaten, dan upaya yang terus menerus, citra perpajakan yang tidak baik serta sikap skeptis dan apriori tersebut kita hadapi dan kita kikis sehingga tercipta

suasana yang jauh lebih baik,” catat Radius.

Pada akhirnya, reformasi perpajakan berjalan dengan baik dan membuahkan hasil. Jumlah wajib pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejalan dengan itu, penerimaan negara dari pajak pun naik.

Reformasi perpajakan juga mengubah struktur penerimaan negara. Penerimaan di luar migas naik dari 32,8 persen selama Repelita III menjadi 65,8 persen selama Repelita V. Dalam tahun 1993/94 penerimaan nonmigas mencapai 76,1 persen dari total penerimaan dalam negeri. Persentase di atas 60 persen mulai dicapai sejak tahun anggaran 1989/90. Sejak tahun 1986/87 penerimaan nonmigas bahkan melampaui penerimaan migas.

Reformasi perpajakan masih terus berlangsung. Pada 1994, pemerintah melakukan perubahan dan penyempurnaan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi yang terjadi. Lalu, tiga tahun kemudian tepatnya pada 1997, untuk menyempurnakan regulasi yang sudah ada, pemerintah menerbitkan serangkaian UU baru di bidang perpajakan.

Reformasi pajak terus berlanjut hingga kini. Sebagai penyambung estafet reformasi pajak yang sudah berlangsung selama 40 tahun, pada 2021, pemerintah mengesahkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

“Upaya pembaruan sistem perpajakan yang dilaksanakan pemerintah merupakan suatu kisah sukses yang perlu dicatat sebagai kerja bersama, karena berhasil meningkatkan jumlah pembayar pajak dan penerimaannya, tanpa menimbulkan gejolak dalam masyarakat,” tulis Radius.

# 8

## Kala SIAP Menghambat Pembangunan

Dari tahun ke tahun, rendahnya penyerapan anggaran negara meningkat. Anggaran proyek-proyek pembangunan yang belum terpakai itu diatur dengan sistem SIAP. Dinilai menghambat pembangunan, Radius Prawiro menghapuskannya.





\_01

\_01 Rapat Kerja Departemen Perdagangan oleh Menteri Perdagangan, Drs. Radius Prawiro bertempat di Balai Sidang Senayan Jakarta pada 3 Mei 1976. (Perpusnas RI)

\_02 Menteri Perdagangan Radius Prawiro dan Pangkoptib Laksamana Sudomo mengadakan pertemuan dengan pengusaha-pengusaha Asosiasi di Departemen Perdagangan pada 22 Januari 1979. (Perpusnas RI)

**K**ETIKA menjabat Menteri Keuangan, Radius Prawiro harus menghadapi masalah klasik dalam menyusun dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi kalau bukan rendahnya penyerapan anggaran. Memang sudah ada mekanisme untuk mengatur Sisa Anggaran Pembangunan atau disingkat SIAP. Masalahnya, setiap tahun SIAP selalu meningkat.

Dalam rapat kerja dengan Komisi APBN Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 21-23 November 1983, Radius menjelaskan penyediaan dana dalam Daftar Isian Proyek (DIP) dikaitkan langsung dengan sasaran atau target yang ditetapkan dalam DIP yang bersangkutan. Namun, bisa terjadi sasaran yang ditetapkan telah tercapai dan masih menyisakan sejumlah dana.

“Sisa dana inilah yang disebut SIAP mati,” ujarnya. “Dana-dana yang berasal dari SIAP mati berupa uang yang belum dipertanggungjawabkan itu pada akhir tahun anggaran akan masuk dalam penerimaan bukan pajak.”

Selain SIAP mati, terdapat apa yang disebut SIAP murni atau hidup, yang masih dapat dihabiskan. Untuk Tahun 1982/1983 terdapat peningkatan SIAP murni yang, menurut Radius, disebabkan kenaikan SIAP pada proyek-proyek Inpres sebesar 28,12%.

Di beberapa departemen, SIAP akumulatif terbilang cukup besar. Antara lain terjadi di Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal ini umumnya terjadi karena masalah penyediaan

dan pembebasan lahan yang memerlukan waktu lama.

“Peningkatan daya serap tersebut sebenarnya dapat lebih besar lagi apabila masalah tanah dapat diselesaikan lebih cepat,” ujarnya.

Dengan adanya petunjuk-petunjuk lengkap diharapkan daya serap departemen/lembaga akan meningkat. Pemerintah juga berupaya meningkatkan koordinasi antarinstansi pelaksana di pusat dan daerah, kemampuan aparaturnya, serta pembinaan terhadap kontraktor pelaksana.

\_02





Namun, kenyataan berkata lain. SIAP cenderung meningkat dari tahun ke tahun, yang akan mengganggu kelancaran pelaksanaan dan penyelesaian proyek-proyek pembangunan.

### SIAP dalam Sejarah

Rendahnya penyerapan anggaran bukanlah masalah baru. Ini sudah terjadi sejak awal Orde Baru. Tapi bagaimana mengatur sisa anggaran yang belum terpakai menjadi problem tersendiri.

Di masa lalu, hal itu diatur dalam pasal 11a Indische Comptabiliteitswet (ICW) atau Undang-Undang (UU) Perbendaharaan Negara. Pasal ini, yang dimasukkan dalam ICW pada 1929, memungkinkan untuk memindahkan anggaran yang belum terpakai dari suatu tahun ke tahun berikutnya tanpa perlu pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem ini dikenal dengan *virement stelsel*.

Namun, melalui UU Darurat No. 3/54, pasal 11a ICW dihapus.

UU itu juga menetapkan perubahan *virement stelsel* menjadi *kas stelsel*.

Sistem kas stelsel kemudian dipakai dalam penyusunan APBN. Pengecualian terjadi pada akhir masa pemerintahan Sukarno.1960-an. Melalui UU No. 12 Tahun 1966, kendati disadari menyimpang dari sistem *kas stelsel*, proyek-proyek boleh menggunakan sisa anggaran dalam tahun 1964 yang tidak habis untuk melanjutkan pekerjaan dalam tahun anggaran 1965.





Pada akhir 1960-an muncul masalah. Gandhi, yang saat itu menjabat Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, diberitahu oleh Menteri Keuangan Ali Wardhana bahwa departemen-departemen menarik uang secara besar-besaran dari Kantor Perbendaharaan Negara. Dikhawatirkan akan timbul kerugian negara apabila pekerjaan yang dimintakan untuk dibayar itu sebenarnya belum selesai.



\_03 Menteri Perdagangan Radius Prawiro melantik staf ahli urusan pengkajian program pada Menteri Muda Urusan Koperasi Drs. Wahyu Sukotjo dan staf ahli urusan analisa dan evaluasi Drs. M. Sidik Moelyono di Departemen Perdagangan pada 2 Mei 1980. (Perpusnas RI)

“Dari pemeriksaan ternyata hampir 90 persen pekerjaan yang dinyatakan telah selesai dan dimintakan pembayarannya belum selesai bahkan ada yang baru dimulai,” catat Gandhi dalam *Kesan Para Sahabat tentang Widjojo Nitisastro* suntingan Moh. Arsjad Anwar dkk.

Repotnya lagi, dana itu sudah di tangan pemborong dan di luar kendali pimpinan proyek. Banyak juga uang tunai dalam jumlah besar disimpan dalam lemari biasa, bahkan di bawah meja kerja yang hanya ditutup triplek.

“Uang-uang itu diharuskan disetor kembali ke Kas Negara,” catat Gandhi.

Menurut Gandhi, penyebab keadaan ini adalah para pimpinan proyek khawatir “hangusnya” anggaran. Sedangkan untuk tahun berikutnya belum tentu mendapatkan anggaran lagi untuk pekerjaan serupa. Agar kejadian ini tak terulang lagi, Departemen Keuangan mulai membicarakan sistem yang dapat menghilangkan ketakutan akan “hangus” tersebut.

Sebagian ahli mengusulkan untuk menghidupkan kembali pasal 11a ICW. Tapi akan sulit “menggolkan” di DPR tanpa merembet ke pasal-pasal lain atau bahkan mengganti ICW yang akan memakan waktu. Selain itu, pelaksanaannya juga tidak mudah. Sebab, sebelum anggaran tahun berikutnya diajukan ke DPR, pemerintah harus menghitung besarnya jumlah yang akan di-*virement* dan anggaran yang sudah dilaksanakan (kebanyakan berupa taksiran).

“Karena itu dipilih *virement* yang dimodifikasi, yang terkenal dengan sistem SIAP (Sisa

Anggaran Pembangunan),” catat Gandhi. “Sistem ini tidak perlu mengubah ICW, cukup dengan mencantumkan dalam UU APBN setiap tahun bahwa SIAP secara otomatis dipindahkan/ ditambahkan pada anggaran tahun yang berikut.”

Ketentuan mengenai SIAP pun mulai diberlakukan pada tahun kedua Pelita I (1969-1974). Kemudian mulai tahun keempat Pelita I ditambahkan ketentuan mengenai SIAP mati untuk proyek yang telah selesai.

Saat itu, SIAP dapat digunakan tanpa batasan waktu tahun anggaran penggunaannya. Sejak tahun keempat Pelita III (1979-1984) penggunaan SIAP dibatasi selambat-lambatnya tiga tahun anggaran berturut-turut. Ketentuan ini diubah menjadi dua tahun sejak tahun pertama sampai dengan tahun kedua Pelita IV (1984-1989).

Menurut JB Sumarlin, ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 1983-1988, SIAP berfungsi mencegah penggunaan anggaran untuk hal-hal kurang berguna yang ditujukan hanya untuk menghabiskan anggaran tahun bersangkutan.

“Jika memang masih terdapat sisa, tentunya lebih baik apabila dimanfaatkan dalam masa anggaran berikutnya,” ujarnya, dikutip *Rupiah di Tengah Rentang Sejarah* terbitan Kementerian Keuangan.

Dua puluh lima persen. “Itulah SIAP yang wajar,” ujar Sumarlin. Kalaupun pada awal Pelita III jumlah SIAP membesar, “Hal itu disebabkan adanya perubahan pola perencanaan pada awal Pelita III yaitu berdasarkan usul tiap-tiap departemen yang pada kenyataannya banyak yang berlebih-lebihan.”

## Masalah Tanah

Namun, SIAP masih menghantui Kementerian Keuangan di bawah Radius Prawiro. Kendati beragam cara dilakukan, jumlah SIAP meningkat. Untuk anggaran 1984/1985 saja, SIAP mencapai Rp2,7 triliun.

Radius menyebut SIAP terjadi antara lain karena lambannya pelaksanaan proyek. Akibat susulannya terjadi kelesuan pasaran bahan bangunan produksi dalam negeri seperti semen, eternit, dan besi beton.

“Jika penggunaan anggaran pembangunan dapat dipercepat maka akan banyak barang-barang hasil produksi dalam negeri yang dapat dipasarkan, lebih-lebih setiap proyek pembangunan harus menggunakan hasil produksi dalam negeri,” kata Radius dikutip majalah *Pemeriksa*, September 1984.

Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan Radius dan berbagai pihak termasuk dari Bank Dunia, daya serap dari berbagai proyek pembangunan di Indonesia dipengaruhi oleh masalah tanah dan pelaksanaan operasional seperti proses penyelenggaraan pelelangan, administrasi, dan sebagainya.

“Kesulitan tanah tersebut mungkin dapat diatasi lebih cepat apabila pendekatan dan koordinasi antara pengelola proyek dengan pemerintah daerah dapat disempurnakan,” kata Radius.

Untuk mengatasi masalah tanah untuk proyek pembangunan, pemerintah kemudian membentuk “Panitia Sembilan” yang bertugas menyediakan tanah untuk kepentingan proyek melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri



\_04 Rapat Kerja Departemen Perdagangan oleh Menteri Perdagangan, Drs. Radius Prawiro bertempat di Balai Sidang Senayan Jakarta pada 3 Mei 1976. (Perpusnas RI)

No. 2 Tahun 1985. Namun SIAP masih tetap ada.

Pada 1985, Radius menghadapi tahun-tahun sulit. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, peningkatan APBN 1985/1986 sangatlah kecil. Ini kali pertama terjadi sejak Pelita I. Penyebab utamanya adalah harga minyak di pasaran dunia merosot. Padahal penerimaan negara dari minyak bumi masih merupakan yang terbesar.

Di depan Sidang Pleno DPR tanggal 28 Januari 1985, Radius menyikapi kecilnya anggaran pembangunan tersebut dengan “mempertajam prioritas”. Pemerintah juga selalu berupaya agar kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. Dengan demikian pada akhir tahun anggaran tidak terjadi SIAP yang terlampaui besar.

Beberapa langkah yang diambil antara lain mengadakan





-04

penataran/bimbingan teknis untuk para pemimpin proyek, bendahara proyek, dan para pelaksana pembiayaan; melimpahkan wewenang kepada daerah untuk merevisi Daftar Isian Proyek (DIP) dengan pagu Rp 100 juta ke bawah, serta meningkatkan koordinasi dan monitoring.

Menurut Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dikutip *Parlementaria* 16 Maret 1986, soal tanah bukan lagi satu-satunya penyebab SIAP. Ada permasalahan yang lebih mendasar dan fundamental. Antara lain kurang memadainya manajemen aparat pemerintah, koordinasi antara instansi dan pengawasannya, hingga birokrasi pemerintah. Misal, penanganan tender dan penyediaan barang harus disetujui oleh Tim Keppres 10 –yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 1980 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang dan Peralatan Pemerintah– yang berbelit-belit.

## SIAP Hapus

Dampak turunnya harga minyak masih dirasakan dalam penyusunan APBN 1986/1987. Hal ini mendorong pemerintah bersikap realistis.

Dalam pembahasan di DPR pada 27 Februari 1986, Radius Prawiro menyebut dengan terbatasnya penerimaan negara, diperlukan pengendalian dalam pengeluaran rutin serta pemilihan dan penajaman prioritas pembangunan. Dengan demikian, penggunaan dana yang terbatas itu menjadi lebih efektif.

Penerimaan negara yang cenderung menurun dan jumlah SIAP yang membengkak dari tahun ke tahun mendorong pemerintah untuk melakukan pembaruan dalam penyusunan anggaran. Jalan yang dipilih adalah penghapusan sistem SIAP, yang sudah diberlakukan selama 15 tahun (1970-1985).

Radius menilai SIAP menghambat pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Maka, Radius menyampaikan soal rencana penghapusan sistem SIAP, yang termuat dalam Pasal 4 RUU APBN 1986/1987.

Penghapusan SIAP diharapkan membantu langkah-langkah penghematan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang terbatas, serta mempertajam prioritas dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

DPR menyambut baik rencana tersebut. Fraksi-fraksi di DPR berharap pemerintah melakukan persiapan yang matang. Penghapusan SIAP juga menuntut pemerintah untuk bekerja lebih keras lagi serta dibarengi dengan peningkatan dan penyempurnaan pengawasan.

Pembahasan RUU berjalan lancar. Pada 7 Maret 1986, Presiden Soeharto mengesahkan UU No. 1 Tahun 1986 tentang APBN 1986/1987, yang kemudian mendapat tambahan dan perubahan dalam UU No. 3 Tahun 1986.

Maka, dalam tahun anggaran 1986/87, SIAP tidak ada lagi. Anggaran yang tak terpakai dinyatakan hapus (hilang) dan harus diajukan anggaran yang baru.

Menurut Mustopadidjaja AR dalam “ZBB, Teori dan Implikasi Praktis” dalam jurnal *EKI* Vol. XXXI V No. 1, 1986, sistem *Zero Base Budgeting* (ZBB) adalah alternatif yang dipilih untuk pembaruan dalam proses penyusunan anggaran. Salah satu ciri pokok dari ZBB adalah bahwa anggaran dari suatu departemen/lembaga pemerintah non-departemen mulai dengan nol rupiah. Artinya, “tiadanya rupiah” dari tahun-tahun anggaran terdahulu yang boleh dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pada tahun yang berjalan.

“Dengan demikian SIAP dari tahun anggaran terdahulu tidak dihitung atau seluruhnya ‘mati’ mulai tahun anggaran yang berjalan. Ini memang cara yang paling efektif untuk menghilangkan SIAP.”

Namun, tambah Mustopadidjaja, penerapan ZBB hanya akan efektif apabila berbagai kelemahan kelembagaan lebih dikenali dan diatasi. “Kalau tidak, ia pun akan membawa ‘cela’ atau ‘menderita’ seperti sistem-sistem lain.”

Setelah SIAP dihapuskan, pemerintah membentuk Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan dengan Dana Luar Negeri (TP4DLN) untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai dengan bantuan luar negeri. Upaya penyempurnaan organisasi dan tata kerja Departemen Keuangan juga terus dilanjutkan.



\_01

9

## **Lobi-Lobi Internasional**

Radius Prawiro berperan dalam penyelesaian utang luar negeri sekaligus memperoleh pinjaman baru untuk pembangunan.



**S**UATU hari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan (Menko Ekuin) Radius Prawiro terlibat dalam jamuan makan malam bersama Ketua Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) sekaligus Menteri Kerja Sama dan Pembangunan Belanda Jan Pieter Pronk, Kwik Kian Gie, dan Pemimpin Redaksi *The Jakarta Post* Sabam Siagian.

Sambil makan, Sabam bercerita tentang kekejaman operasi militer di Timor Timur dalam apa yang dikenal dengan Pembantaian Santa Cruz. Para demonstran pro-kemerdekaan ditembak di dekat Kompleks Pemakaman Santa Cruz, Dili, Timor Timur pada 12 November 1991.

Pronk yang juga politisi Partai Buruh di Belanda menyimak cerita tersebut dengan takzim. “Sepulang dari Indonesia, Pronk yang *ex officio* ketua IGGI menulis surat kepada pemerintah Indonesia, bahwa semua bantuan dan pinjaman ditangguhkan sampai dirinya diizinkan dan selesai melakukan inspeksi di Timor Timur,” tulis Kwik Kian Gie dalam memoarnya *Menelusuri Zaman*.

Ancaman itu membuat Presiden Soeharto murka. Dia memerintahkan Radius untuk membubarkan IGGI, konsorsium bantuan internasional untuk Indonesia.

Radius panik. Pembubaran IGGI bisa mengacaukan keuangan negara. Dia membujuk Soeharto agar mempertahankan IGGI tapi mencopot Belanda sebagai ketua. Soeharto bergeming. Akhirnya diputuskan

tetap membubarkan IGGI dan menggantikannya dengan sebuah konsorsium baru dengan Bank Dunia sebagai ketua.

Radius kemudian mengirim surat resmi bertanggal 24 Maret 1992 kepada Perdana Menteri Belanda Ruud Lubbers.

---

\_01 Menteri Perdagangan Luar Negeri Perancis, Robert Segard tiba di bandara udara Halim Perdanakusuma disambut oleh Menteri Perdagangan RI, Drs. Radius Prawiro saat melakukan kunjungan ke Indonesia pada 28 Februari 1975. (Perpusnas RI)

\_02 Menteri Perdagangan Drs. Radius Prawiro membuka sidang ke V Pejabat Perdagangan tingkat senior negara-negara ASEAN bertempat di Departemen Perdagangan tanggal 2 Desember 1975. (Perpusnas RI)

\_02







\_03

\_04







\_05

\_03 Gubernur Bank Sentral Drs. Radius Prawiro menerima kunjungan Mr. Samuel H. Wooley dan Mr. Sherwood, Chairman dan VIQ Presiden Bank of New York, pada 8 November 1971. (Khastara Perpusnas RI)

\_04 Delegasi M.E.E. (Masyarakat Ekonomi Eropa) diterima Menteri Perdagangan, Drs. Radius Prawiro, di ruang kerjanya di Departemen Perdagangan 3 Des 1973. (Perpusnas RI)

\_05 Pres. Nederlandse Bank Prof. Dr. J. Zijketia tiba di Airport Kemayoran Jkt. 14 Okt. 1970. Disambut oleh Gub. Bank Sentral Drs. Radius Prawiro di ruang VIP Airport Kemayoran Jakarta. (Khastara Perpusnas RI)

Dalam suratnya, Radius menyebut memburuknya hubungan kedua negara karena penggunaan bantuan pembangunan sebagai instrumen intimidasi atau alat untuk mengancam Indonesia. Diingatkan pula bahwa hubungan itu terjalin di atas tumpukan abu sejarah yang menyakitkan dari penjajahan kolonial dan kekejaman selama perang kemerdekaan Indonesia.

Maka, tulis Radius, “satu-satunya pilihan yang tersisa untuk mencegah terkikisnya hubungan antara Indonesia dan Belanda adalah dengan menghentikan sepenuhnya semua bantuan pembangunan dari Belanda kepada Indonesia.”

Peran IGGI yang selama 25 tahun membantu Indonesia pun berakhir.

## Penjadwalan Utang

Radius Prawiro adalah orang penting di balik terbentuknya IGGI di awal-awal Orde Baru, baik dalam kapasitas sebagai Gubernur Bank Indonesia maupun anggota Tim Ahli Ekonomi Presiden yang dipimpin oleh Widjojo Nitisastro.

Ketika menjabat Ketua Presiden Kabinet Ampera, Jenderal Soeharto mewarisi keterpurukan ekonomi dan utang luar negeri yang jatuh tempo sebesar US\$2,2 miliar. Dia menugaskan Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk melakukan lobi-lobi internasional.

Sebagai orang kepercayaan Sultan, Radius melawat ke Tokyo dengan tujuan meletakkan kerangka dasar untuk pertemuan para kreditur. “Dengan dukungan

Presidium, saya bertemu Menteri Keuangan Jepang Takeo Fukuda,” ujar Radius.

Atas inisiatif Jepang, pertemuan dengan para kreditur dihelat di Tokyo pada 19-20 September 1966. Turut hadir pula tim dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Forum ini kemudian dikenal dengan Tokyo Club.

Hasil pertemuan amat positif. Kendati tanpa komitmen, Jepang dan kreditur-kreditur Barat mendukung saran IMF bahwa penundaan pembayaran utang Indonesia disatukan dalam paket pinjaman baru. Namun, mereka ingin informasi lebih lanjut mengenai rencana stabilisasi.

Tiga bulan kemudian, pertemuan lanjutan diadakan di Paris, sehingga dikenal dengan Paris Club. Setelah berdiskusi panjang-lebar, forum menyetujui penjadwalan ulang pembayaran utang Indonesia yang jatuh tempo. Forum juga sepakat membentuk konsorsium bernama IGGI, dengan Belanda sebagai ketuanya, untuk memberikan pinjaman ke Indonesia.

IGGI mengadakan pertemuan pertamanya di Amsterdam pada 20 Februari 1967. Hasil pertemuan: Indonesia mendapatkan pinjaman baru senilai 200 juta dolar. Pinjaman tersebut masuk kategori pinjaman lunak (*soft loan*) dengan bunga 3 persen dan rentang waktu pengembalian 25 tahun plus masa tenggang tujuh tahun. Selain pinjaman, ada pula hibah.

“IGGI dengan cepat menonjol menjadi forum akbar untuk menangani masalah utang Indonesia yang kompleks,” catat Radius.

penopang pembangunan Indonesia. Dari 1967 hingga 1974, IGGI mengadakan dua kali pertemuan setiap tahunnya. Setelah itu, pertemuan hanya diadakan sekali dalam setahun karena perkembangan ekonomi Indonesia yang membaik.

Radius sendiri kemudian memegang jabatan prestisius di lembaga-lembaga keuangan internasional. Dia tercatat sebagai gubernur IMF dan merangkap Wakil Gubernur Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk Indonesia dari 1967 hingga 1971. Dia juga menduduki Ketua Dewan Gubernur Bank Dunia (IBRD) selama 1971-1973.

Selain IGGI, Indonesia mencari sumber dana pinjaman dari negara-negara atau lembaga keuangan internasional maupun regional yang bukan anggota IGGI seperti Timur Tengah. Sama seperti prosedur IGGI, pinjaman dari pemerintah suatu negara disalurkan melalui badan atau lembaga keuangan yang dibentuk untuk itu. Misalnya, Jepang melalui Overseas Economic Cooperation Fund (OECF).

Pada Maret 1973, Radius memimpin delegasi untuk bernegosiasi dengan OECF. Kerja keras itu tak sia-sia. Jepang bersedia memberikan 62 miliar yen di luar kerangka bantuan IGGI.

Sebagian besar utang luar negeri Indonesia digunakan untuk program dan proyek pembangunan. Dan IGGI merupakan sumber terbesar untuk Indonesia. Menurut Radius, "IGGI merupakan contoh dari forum yang efektif

untuk pengelolaan utang dan bantuan luar negeri yang sangat berjasa bagi pembangunan ekonomi," catat Radius.

Peran IGGI berakhir akibat campur tangan Belanda dalam urusan dalam negeri Indonesia.

## **Pengganti yang Sepadan**

Sebelum pembubaran IGGI, pemerintah Indonesia sudah mempersiapkan penggantinya. Pada Januari dan Februari 1992, Menteri Luar Negeri Ali Alatas melakukan kunjungan ke Jepang dan kantor Bank Dunia untuk meminta kesediaan mereka melanjutkan keanggotaan dalam konsorsium donor yang baru.

Menko Ekuin Radius Prawiro memasang sekitar seratus mesin faks di departemennya dan mengirim pemberitahuan ke semua kedutaan besar Indonesia di dunia bahwa mereka akan menerima faks berisi surat penjelasan mengenai keputusan pemerintah pada 25 Maret 1992. Para duta besar harus segera membuat janji temu dengan Menteri Luar Negeri di negara mereka bertugas. Diharapkan dunia internasional memahami dan tetap mempertahankan dukungan kepada Indonesia.

Menurut Radius, perangkat informasi dipersiapkan dengan baik agar keputusan Indonesia tak bocor terlebih dulu. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan M.L. Vos untuk tesisnya di Universitas Amsterdam tahun 2011 berjudul "International Cooperation between Politics and Practice: How Dutch Indonesian Cooperation Changed Remarkably Little after a Diplomatic Rupture."

Pada waktu yang sudah ditentukan, faks-faks pun dikirim. Di Belanda, Duta Besar Indonesia untuk Belanda Bintoro Tjokroamidjojo segera menyerahkan surat dari Radius tertanggal 24 Maret 1992 kepada Perdana Menteri Belanda Ruud Lubbers.

Ketika ditanya wartawan kenapa isi suratnya begitu keras, Radius menjawab sambil berkelakar: "Ini kan bukan surat cinta."

Pada saat bersamaan, Menteri Keuangan JB Sumarlin mengirim surat kepada Presiden Direktur Bank Dunia Lewis Preston. Isi surat tertanggal 24 Maret 1992 meminta Bank Dunia membentuk suatu forum khusus pengganti IGGI. Diharapkan pula Bank Dunia menggelar pertemuan guna pembentukan forum tersebut dalam tahun ini juga. "Kami telah memberitahu semua pemerintah dan organisasi internasional lainnya guna membantu Indonesia dalam hal ini," demikian bunyi surat itu.

Dalam jawabannya pada 8 April 1992, Bank Dunia menerima permohonan pemerintah Indonesia. Terbentuknya Consultative Group on Indonesia (CGI) yang diketuai oleh Bank Dunia.

CGI melakukan sidang pertamanya di Paris pada 16-17 Juli 1992. Radius memimpin delegasi Indonesia. Pertemuan yang dihadiri 19 negara serta 13 lembaga keuangan dan pembangunan multilateral internasional itu menyepakati pinjaman baru untuk Indonesia sebesar US\$ 4,9 miliar.

Selama di Paris, Radius mengadakan rapat tertutup



dengan Perdana Menteri Belanda Lubbers di Hotel De Lafayette, tempat menginap delegasi Indonesia. Penjelasan Radius diterima dengan baik oleh Lubbers. Bahkan mereka keluar dari ruang rapat dan menemui wartawan dengan tertawa terbahak-bahak.

“Kita teman lama sejak kuliah di Rotterdam,” ujar Lubbers.

Sejak 1992, CGI bersidang dua kali dalam setahun. Dalam setiap pertemuan dibahas seberapa besar komitmen dukungan pendanaan (*pledge*) kepada Indonesia. Persyaratan pinjaman CGI tak jauh beda dari IGGI, baik mengenai tingkat bunga, masa pinjaman, masa tenggang waktu, atau persyaratan lainnya.

“CGI tetap mempertahankan spirit IGGI dan melakukan tugasnya sebagai partner Indonesia yang bernilai tinggi dalam mendukung pembangunan Indonesia,” ujar Radius.

Pada 2004, kepemimpinan CGI berpindah ke pemerintah Indonesia. CGI dibubarkan pada 24 Januari 2007 dengan kesadaran bahwa Indonesia harus melepaskan diri dari jebakan utang luar negeri.

## Utang Swasta

Radius mengakhiri kariernya dengan posisi terakhir sebagai Menko Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan Indonesia. Namun, dia tak bisa benar-benar menikmati masa pensiunnya. Pengalamannya melobi dunia internasional dalam IGGI dan CGI maupun penyelesaian utang luar negeri

Pertamina amat dibutuhkan.

Ketika kekuasaan Soeharto berada di ujung tanduk karena krisis moneter, Radius, yang mewakili swasta, ditunjuk sebagai anggota Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPEK) pada 1998. Tugasnya melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program reformasi dan restrukturisasi ekonomi dan keuangan. Dalam pelaksanaannya, DPEK dibantu oleh pejabat tinggi Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai penasihat.

Selain itu, Radius ditunjuk sebagai ketua Tim Penanggulungan Utang Luar Negeri Swasta (PULNS). Dia dibantu oleh Anthony Salim, Rahmat Gobel, dan The Ning King, tiga pengusaha swasta terkemuka.

Saat itu utang swasta memiliki porsi yang lebih besar daripada utang pemerintah. Menurut Radius, total utang luar negeri Indonesia mencapai sekitar US\$137,424 miliar, yang terdiri atas utang pemerintah US\$63,462 miliar dan utang swasta US\$73,962 miliar.

Radius melakukan pemisahan utang swasta ke dalam utang swasta murni (nasional) dan utang swasta asing (perusahaan *joint venture* dan perusahaan asing di Indonesia). Utang swasta nasional sekitar US\$23,069 miliar atau sekitar sepertiga dari total utang swasta. Jumlah utang luar negeri swasta yang telah jatuh tempo pada akhir 1998 diperkirakan mencapai US\$34 miliar.

Untuk itulah Radius membentuk satuan tugas

negosiator utang.

Pada 14 - 17 April 1998, Radius memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan di New York. Pertemuan tersebut membahas prinsip-prinsip dasar yang melandasi kerangka dasar penyelesaian utang luar negeri swasta Indonesia, tunggakan utang perdagangan, dan utang perbankan Indonesia dengan perbankan luar negeri, serta masalah ekonomi Indonesia pada umumnya. Pertemuan antara lain menghasilkan kesepakatan membentuk kerangka kerja yang didasarkan pada Ficorca Meksiko tahun 1983.

Sebagai tindak lanjut, Radius menghadiri pertemuan di Tokyo pada 8- 10 Mei 1998. Pertemuan menyepakati masalah utang sektor perbankan dan pendanaan perdagangan. Sementara masalah utang luar negeri swasta dibawa pada pertemuan di Frankfurt pada 1-4 Juni 1998. Pemerintah Indonesia bersama 13 bankir asing menyepakati penjadwalan ulang utang luar negeri swasta Indonesia selama delapan tahun/*grace period* 3 tahun.

Sekali lagi, Radius membuktikan kepiawaiannya bernegosiasi, sehingga utang luar negeri swasta bisa ditanggulangi dan ditangguhkan pembayarannya.

Namun, belum tuntas tugas Radius, Soeharto keburu lengser. Tim tersebut dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 26 Februari 2000.

Radius pun menghabiskan hari-hari tuanya dengan mengabdikan diri kepada gereja dan membantu generasi muda.

# 10

## Jalan Radius sebagai Pengikut Jesus

Sebagai umat yang taat,  
Radius mencurahkan waktu  
untuk memberi perhatian  
pada gereja dan jemaat. Dia  
juga menekuni kembali hobi  
lamanya.







\_01

\_01     Drs. Radius Prawiro  
meresmikan Gereja Kristen  
Jawa (GKJ) Kebayoran Depok  
pada 4 Juni 1979. (Perpusnas RI)



\_02 Radius Prawiro membuka Pekan Disain I hasil industri kerajinan, komponen mesin di Bali Room Hotel Indonesia pada 16 September 1980. (Perpusnas RI)



\_02

**T**AK ada yang menduga peristiwa nahas ini terjadi. Pada akhir

1956, Radius Prawiro bersama beberapa rekan menghadiri sebuah konferensi di Woudschoten, Zeist, Belanda. Meski sibuk kuliah di Nederlandsche Economische Hogeschool, Rotterdam, Belanda, Radius juga aktif dalam Perserikatan Kristen Indonesia (Perki) cabang Rotterdam, bahkan jadi ketuanya.

Usai acara, mereka pulang dengan menumpang bus. Namun, di sebuah perempatan, bus yang mereka tumpangi ditabrak oleh kendaraan dari arah samping. Radius mengalami luka-luka, sementara seorang temannya meninggal dunia. Mereka segera dilarikan ke sebuah RS di Leiden.

Kondisi Radius ternyata cukup parah. Dia mengalami gegar otak hingga harus dirawat intensif. Selepas opname, dia menjalani rawat jalan di rumah suami-istri Moekarno Notowidigdo, orang tua angkatnya yang merupakan kawan dekat ibunya. Selama masa pemulihan, beberapa kawan menjenguknya. Salah satu

yang rajin datang adalah Leonie “Onie” Supit, sekretaris Perki.

Seiring waktu, hubungan Radius dengan Onie kian rapat. Cinta pun bersemi. Mereka menikah pada 5 Juli 1958. Resepsi digelar di Gereformeerde Kerk di Den Haag.

Setelah menikah, Radius dan istrinya tinggal di sebuah kamar di Wisma Indonesia, Den Haag. Pada Maret 1959, anak pertama mereka lahir: Baktinendra Prawiro. Radius, yang anak bidan, ikut membantu proses persalinan.

Beasiswa Radius tidak mencukupi untuk membiayai keluarga kecilnya. Maka, Radius dan istrinya mengambil kerja sampingan sebagai pengajar di



Sekolah Indonesia yang baru didirikan oleh Kedutaan di Den Haag.

“Saya menjadi guru Ilmu Pasti, dan ibu menjadi guru Ilmu Bumi, Sejarah, dan Bahasa Inggris,” kata Radius dalam testimoninya di buku *Untaian Perjalanan Leonie Radius Prawiro-Supit*.

Begitu studinya selesai awal 1960, Radius memboyong keluarganya pulang ke tanah air.

Di Jakarta, Radius bekerja di Direktorat Akuntan Negara dan mendapatkan rumah dinas di Jalan Dharmawangsa 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di rumah inilah ketiga anaknya lahir: Loka Manya, Triputra Yusni Prawiro, dan Pingkan Riani Putri Prawiro.

## Dilarang Naik Motor

Gaji pegawai negeri amat kecil. Tak cukup untuk menghidupi istri dan empat anaknya. Belum lagi Radius melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia untuk mendapatkan gelar bidang akuntansi. “Sehingga harus mencari tambahan penghasilan dengan mengajar di beberapa lembaga,” kata Onie, dikutip Retno Kintoko dalam *Untaian Perjalanan Leonie Radius Prawiro-Supit*.

Radius baru bisa bernapas lega setelah diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 1966. Tak perlu lagi kerja sampingan. Lebih punya waktu buat keluarga: makan bersama, berkumpul, bercengkerama, atau berlibur. Namun ada hobinya yang harus dipinggirkan.

Radius gemar mengendarai sepeda motor. Ketika kuliah di Belanda, dia pernah keliling Eropa dengan mengendarai sepeda motor BMW. Kendati pernah jatuh karena tergelincir, kegemarannya masih diteruskan di Indonesia. Sampai memangku

jabatan Asisten Ahli Akuntansi pada Direktorat Akuntansi Negara lalu anggota Badan Pengawas Keuangan, dia tetap bersepeda motor sebagai hobi.

Setelah menjabat Gubernur Bank Indonesia, dia menghentikan kegemarannya itu. Pihak Bank Indonesia khawatir bila sang pejabat terus-menerus menggunakan kendaraan terbuka.

“Karena pertimbangan keamanan dari pemerintah, saya lalu disuruh naik mobil terus,” ujarnya, dikutip Apa dan Siapa Tempo. “Tapi, saya sendiri masih senang naik sepeda motor sampai sekarang.”

Masih ada lagi kegemanan Radius yang lain, yaitu fotografi. Sewaktu liburan keluarga, mengunjungi beberapa tempat yang indah dan menarik, Radius menyalurkan hobi fotografinya. Mula-mula hanya untuk mengabadikan momen indah bersama istri dan anak-anaknya. Seiring waktu, dia meningkatkan pengetahuan dan teknik fotografinya.

Tak hanya acara keluarga. Dalam acara formal pun Radius kerap membidik kameranya. Ketika peresmian pengangkatan orang tua asuh tahun 1985, Radius sibuk jepret-jepret untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Ketika disapa beberapa tamu, dia berujar “persiapan pensiun, mencoba jadi juru potret.”

Salah satu tempat yang kerap dikunjunginya adalah Bogor, tempat mertuanya tinggal. Selain berlibur, Radius ingin mendekatkan anak-anaknya dengan kakek-nenek mereka dari pihak ibu. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk membangun rumah peristirahatan di sana.

Pada 1971, Radius membeli sebidang tanah di Desa Caringin dan membangun rumah peristirahatan. Rumah itu dipakai untuk tempat berlibur

sekaligus menyalurkan hobi lainnya: beternak. Bersama istrinya, Radius ikut mendirikan *Hybrida Indonesia (Hydon)*, sebuah perusahaan peternakan ayam di Bogor, yang kemudian berkembang dan dikelola oleh anak-anaknya.

Di tengah kesibukannya sebagai Menteri, Radius beternak ayam di Caringin. Karena kurang berkembang dengan baik, dia beralih ke peternakan ikan. Ini pun kurang berhasil. Ganti lagi dengan domba, yang didatangkan dari Australia. Usaha ini pun tersendat-sendat. Akhirnya diputuskan untuk mendirikan rumah pertemuan untuk keluarga di tempat tersebut yang dikelola oleh Yayasan Kinasih. Rumah ini juga kerap disewa oleh gereja-gereja untuk keperluan retreat.

“Sekarang permintaan untuk menggunakan rumah pertemuan yang berkapasitas 1000-1300 orang tersebut sebagai tempat retreat datangnya juga dari luar negeri,” ujarnya, dikutip *Indonesian Journal* tahun 1997.

Yayasan Kinasih berkembang berkat tangan dingin Leonie Supit. Sebagian pendapatannya disalurkan untuk membantu sesama, terutama warga sekitar. Radius tak sungkan memuji istrinya.

“Mama kamu itu rohaninya tinggi dan banyak mendukung Papa dalam doa. Sedangkan Papa tiap hari harus mengurus hal-hal duniawi di kantor. Kalau kamu cari istri, carilah yang rohaninya seperti Mama,” kata Radius, dikutip Loka Manya Prawiro, putra keduanya, dalam testimoni di buku *Untaian Perjalanan Leonie Radius Prawiro-Supit*.

## Membangun Gereja

Aspek rohani memang tak pernah diabaikan. Sejak kecil Radius dididik dan dibesarkan orang tuanya dengan ajaran

Kristen. Ajaran kasih dan moral tinggi terus terbawa dalam laku kehidupan sehari-harinya. Dia juga berusaha memberikan kebaikan bagi banyak orang.

Selama menjadi mahasiswa di Belanda, Radius aktif dalam kegiatan gereja. Aktivitas itu berlanjut di Indonesia. Dia tercatat menjadi ketua Majelis Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kebayoran Baru, yang saat itu memiliki jemaat sekira 200 orang.

“Radius Prawiro yang menjabat sebagai ketua majelis jemaat pada waktu itu hanya diwarisi bangunan gereja yang masih berupa pondasi” catat buku Menjadi Mitra Allah: Kemarin, Kini dan Esok. Radius kemudian menggerakkan jemaat untuk menyelesaikan pembuatan gedung gereja secara gotong-royong. Gedung gereja selesai dibangun pada 1967.

Kendati warga GKI, Radius mengulurkan tangan untuk gereja lain yang belum memiliki rumah ibadah. Salah satunya Gereja Kristen Jawa (GKJ) Kebayoran.

Saat itu, untuk kebaktian, GKJ Kebayoran menumpang di GKI Kebayoran di Jalan Panglima Polim. Pada Juni 1972, mereka mendirikan Yayasan Pembangunan Gereja Nehemia yang bertugas mendirikan Gedung GKJ di Kebayoran. Namun prosesnya berbelit-belit.

Kebetulan, Perum Perumnas sedang membangun perumahan bagi masyarakat, dengan prioritas pegawai negeri dan ABRI, pada 1970-an. Perumahan ini, yang kemudian jadi Perumnas Depok 1, harus dilengkapi sarana dan prasarana umum, termasuk rumah ibadah.

Pada 1977, Radius ditemui oleh Direktur Utama Perum Perumnas Radinal Mochtar. Dia diminta bantuan untuk merealisasikan pembangunan

gereja di Depok. Maka, Radius menawarkannya kepada GKJ Kebayoran.

Pembangunan gereja pun dimulai Mei 1978. Radius dan ibunya (Soekestri Wirjoprawiro), yang dianggap warga gereja paling tua, ikut melakukan peletakan batu pertama.

Setelah rampung, gereja yang dinamakan GKJ Yeremia, diresmikan pada Juni 1979. Sejak itu GKJ Yeremia dipakai untuk kebaktian pagi bagi jemaat GKJ Kebayoran, sedangkan kebaktian sore tetap di di GKI Kebayoran.

Radius juga membantu GKJ Kebayoran yang kesulitan mendapatkan izin pembangunan gereja di Kebayoran. Berkat bantuan Radius, gedung GKJ Kebayoran bisa dibangun dan rampung pada November 1985.

“Secara jujur, di sini ada tokoh sekaliber Pak Radius Prawiro. Ia orang Jawa, orang tuanya GKJ sama seperti kami, meskipun ia sendiri warga GKI. Dia membantu dan mem-back-up kami di balik layar,” ujar Pdt. Samuel Bambang Haryanto dalam Kontroversi Gereja di Jakarta dan Sekitarnya suntingan Ihsan Ali-Fauzi dkk.

Radius tak melupakan akar sejarahnya. Keluarga dari pihak ibunya adalah pengikut Kiai Sadrach, penginjil Jawa kharismatik. Melalui Yayasan Kinasih, Radius merenovasi gedung gereja peninggalan dan makam Kiai Sadrach di Karangjoso, Kutoarjo.

“Keluarga Radius Prawiro menghargai peninggalan Kiai Sadrach tanpa bermaksud mengkultuskan,” catat Soetarman Soediman Partonadi dalam Komunitas Sadrach dan Akar Kontekstualnya.

## Anti Stres

Perhatian tak hanya tertuju pada pembangunan fisik. Radius Prawiro aktif menyumbangkan

pemikiran mengenai pelayanan Kristen yang di masa lalu “telah banyak membantu masyarakat luas, khususnya dalam bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, dan berbagai prasarana sosial yang lain,” catat Irzan Tanjung dalam *Radius Prawiro: Kiprah, Peran, dan Pemikiran*.

Agar pelayanan sosial-religi tak kendur perlu kaderisasi. Apabila gereja berhasil memberikan dasar pijakan kokoh pada pembinaan generasi muda, bagian penting dari upaya membangun masa depan sudah tercakup.

“Gereja mesti bisa menatap ke depan dan mengantisipasi zaman,” kata Radius.

Sebagai pengurus Lembaga Pendidikan Tinggi Kristen, Radius memberi perhatian pada pengembangan perguruan-perguruan tinggi swasta Kristen di Indonesia. Antara lain dia tercatat sebagai anggota Dewan Penyantun Universitas Kristen Petra, sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya, Jawa Timur, yang terlibat dalam penggalangan dana pembangunan auditorium dan Gedung W.

Radius juga tercatat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PGI selama dua periode (1992-2000). Dia menaruh perhatian terhadap gerakan oikumenis dan pembenahan kepemimpinan gereja. Dia mendorong hubungan antargereja yang lebih baik, agar tak menjauh dari fungsi awalnya sebagai pembina dan pelayan umat.

Selain itu, Radius mendorong agar gereja-gereja ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Hal yang sama disampaikan pada Sidang Tahunan Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) sebagai respon atas program pembangunan di





\_03

Indonesia Bagian Timur (IBT) yang dicetuskan oleh Presiden Soeharto pada 4 Januari 1990.

Tak lupa Radius mengingatkan pentingnya dialog dengan agama-agama lain. Sebab, secara bersama-sama, semua umat beragama mengemban tugas melayani masyarakat, tanpa melihat perbedaan-perbedaan.

Setelah sekira 28 tahun menangani urusan ekonomi negara, Radius akhirnya pensiun pada Maret 1994 dengan jabatan terakhir sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi-Industri (Menko Ekuin). Sejak itulah dia punya lebih banyak waktu untuk memberi perhatian pada gereja.

Sumbangsih Radius dalam aspek keagamaan juga diakui banyak pihak. Salah satunya gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Teologi dari Theologische Universitäten Kampen, lembaga pendidikan teologi di Belanda, pada peringatan Dies Natalis ke-150 tahun 2004.

Setelah pensiun, Radius juga menekuni kembali hobi lama beternak, selaras dengan istrinya, Leonie Supit, yang punya kegemaran berkebun.



\_04

Radius punya acara SAS agar selalu sehat. SAS Program adalah Program Sabtu Anti Stres.

“Sabtu dan Minggu adalah hari untuk menekuni hobi,” ujarnya, dikutip M. Dawam Rahardjo dalam *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*.

Radius Prawiro meninggal dunia di Rumah Sakit Deutsches Herzzentrum, München, Jerman, pada 26 Mei 2005 dalam usia 76 tahun. Jenazahnya disemayamkan di rumah duka di Dharmawangsa 11 Kebayoran Baru dan kemudian dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

\_03 Ny. Tien Suharto selaku ketua umum Ria Pembangunan menerima pengurus baru yang terdiri dari Ny. Radius Prawiro dan Ny. Mintaredja sebagai ketua I dan II di Jalan Cendana pada 8 Februari 1977. (Perpusnas RI)

\_04 Ibu Leonie, Istri Radius Prawiro sedang memilih buku di pameran dari berbagai unsur Organisasi Perguruan Tinggi Penerbit dan Toko Buku oleh Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara, di Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada 18-24 Februari 1987. (Perpusnas RI)



# Rekam Kebijakan

## Radius Prawiro

**1968  
-1971**

Tim Ahli  
Ekonomi

- Memimpin dan menyelesaikan proyek Wisma Nusantara.
- Ikut menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
- Terlibat dalam penjadwalan ulang pembayaran utang luar negeri dan mencari pinjaman baru.
- Terlibat dalam pembentukan Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) tahun 1967.
- Terlibat dalam penyelesaian utang luar negeri Pertamina.

**1966  
-1973**

Gubernur  
Bank Sentral

- Mengembalikan independensi Bank Sentral dalam kebijaksanaan moneter.
- Menyederhanakan Direksi Bank Indonesia dengan memisahkan Bank Sentral dari Bank Negara Indonesia (1966).
- Reformasi perbankan yang dipusatkan pada Bank Sentral.
- Memperkenalkan Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas) dan Tabungan Asuransi Berjangka (Taska) tahun 1968



**1973  
-1983**

### Menteri Perdagangan dan Koperasi

- Menginisiasi Bimas Nasional yang Disempurnakan tahun 1970 untuk meningkatkan produksi padi
- Memperbaiki mekanisme penyaluran pupuk oleh Koperasi Unit Desa (KUD) dan melibatkan pihak swasta.
- Reformasi birokrasi dan pengelolaan KUD.
- Memperkenalkan Kredit Candak Kulak (KCK), Kredit Mini, Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Bimas Padi dan Palawija.
- Menyusun Pola Kebijaksanaan Ekspor 1982 untuk meningkatkan ekspor nonmigas.

Radius Prawiro merupakan salah satu arsitek ekonomi Orde Baru. Selain itu, ia berkiprah di lembaga-lembaga negara dan pemerintahan yang mengurus ekonomi dan keuangan. Berikut beberapa kebijakan yang diambilnya.

**1988  
-1993**

### Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri dan Pengawasan Pembangunan

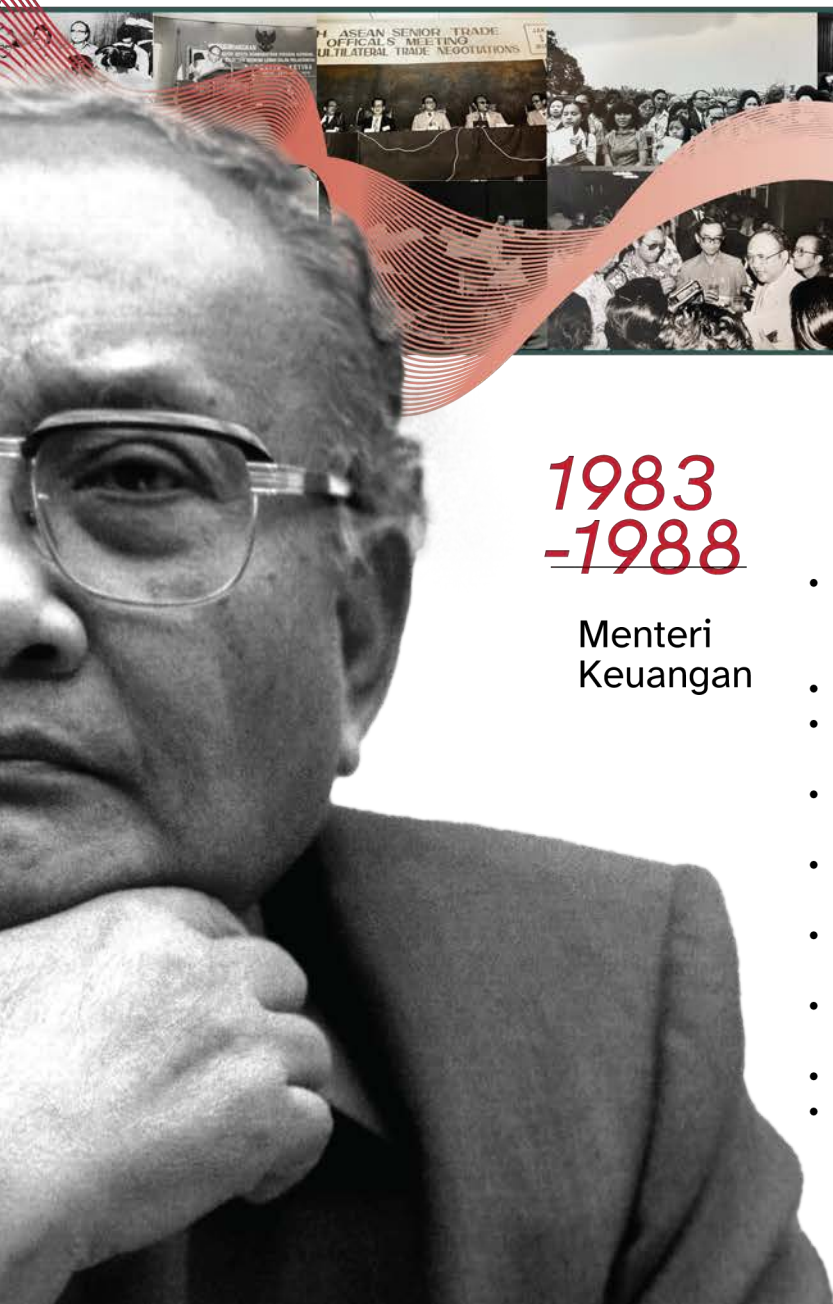
- Pembubaran IGGI dan pembentukan Consultative Group on Indonesia (CGI).



**1983  
-1988**

### Menteri Keuangan

- Reformasi perpajakan dengan terbitnya lima UU Perpajakan. Salah satunya dengan penerapan asas *self-assessment*.
- Pengampunan pajak (April 1984).
- Memperkenalkan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dan Simpanan Pedesaan (Simpedes) tahun 1984.
- Devaluasi 1983 dengan menurunkan nilai rupiah 48 persen dari Rp702,50 menjadi Rp970 per dolar AS.
- Devaluasi 1986 dengan menurunkan nilai rupiah 47 persen dari Rp1.134 ke Rp1.664 per dolar AS.
- Kebijakan Paket 1 Juni 1983 (Pakjun 83) membebaskan bank menentukan suku bunga sendiri.
- Kebijakan Paket Oktober 1988 (Pakto 88) yang memberi kemudahan pendirian bank.
- Reformasi Bea Cukai (1985).
- Menghapus Sisa Anggaran Pembangunan (SIAP) 1986.



Feb-Mei 1960

Magang di Zendingscentrum  
(Pusat Zending), Kota Baarn

Fakultas Ekonomi  
Universitas Indonesia

1960-1965

Pegawai Teknis Direktorat  
Akuntan Negara

- Ikatan Akuntan  
Indonesia

1963

- Persatuan  
Intelegensia Kristen  
Indonesia (PIKI)

1953-1960

Nederlandsche  
Economische Hogeschool,  
Rotterdam, Jurusan  
Ekonomi Perusahaan

- Societas Studiosorum  
Reformatorem  
(Perhimpunan Mahasiswa  
Gereformeerd)
- Ketua Perserikatan  
Kristen Indonesia (Perki)  
cabang Rotterdam
- Persatuan Pelajar  
Indonesia

- Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia  
cabang Yogyakarta

1950

Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada

- Mendirikan Pelajar Kristen  
Mataram (Pelkrima)

1945-1951

Staf Gubernur Militer Daerah  
Istimewa Yogyakarta

- Dewan Penasihat  
Ikatan Akuntan  
Indonesia

1947-1948

Perwira Markas Tertinggi  
Perhubungan TRI

1986-2005

1945

Sekretaris Badan Keamanan  
Rakyat (BKR)

1941

Meer Uitgebreid Lager  
Onderwijs (MULO)

- Organisasi kepanduan Kristen Tridharma  
dan mendirikan perkumpulan sepakbola  
Rukun Agawe Santosa (RAS)

1934

Hollandsch-Javaanse School  
Bintaran Wetan

1988-1993

Menteri Koordinator  
Bidang Ekonomi,  
Keuangan, dan Industri  
dan Pengawasan  
Pembangunan

# Jejak Langkah Radius Prawiro

Lahir: Yogyakarta, 29 Juni 1928



1964

Pejabat setara menteri Pemeriksa Keuangan Agung Muda/anggota pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan

- Terlibat dalam pembentukan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar)

1965

Deputi Menteri Urusan Bank Sentral

1965-1966

Deputi Menteri Pemeriksa Keuangan Negara

1966-1973

Gubernur Bank Indonesia

1967-1971

Gubernur Dana Moneter Internasional (IMF) merangkap Wakil Gubernur Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk Indonesia

1968-1971

Tim Ahli Ekonomi Presiden

Menteri Keuangan

1983-1988

Menteri Perdagangan dan Koperasi

1978-1983

Ketua Dewan Gubernur Bank Dunia (IBRD)

1971-1973

1973-1978

Menteri Perdagangan

- Anggota Dewan Pembina Golkar

Anggota Dewan Audit Bank Indonesia

1993-1995

- Anggota Tim Ahli Ekonomi Masalah Hutang dan Pembangunan Negara-negara Berkembang
- Anggota Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK)
- Ketua Tim Penanggulangan Masalah utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia

1998-2000

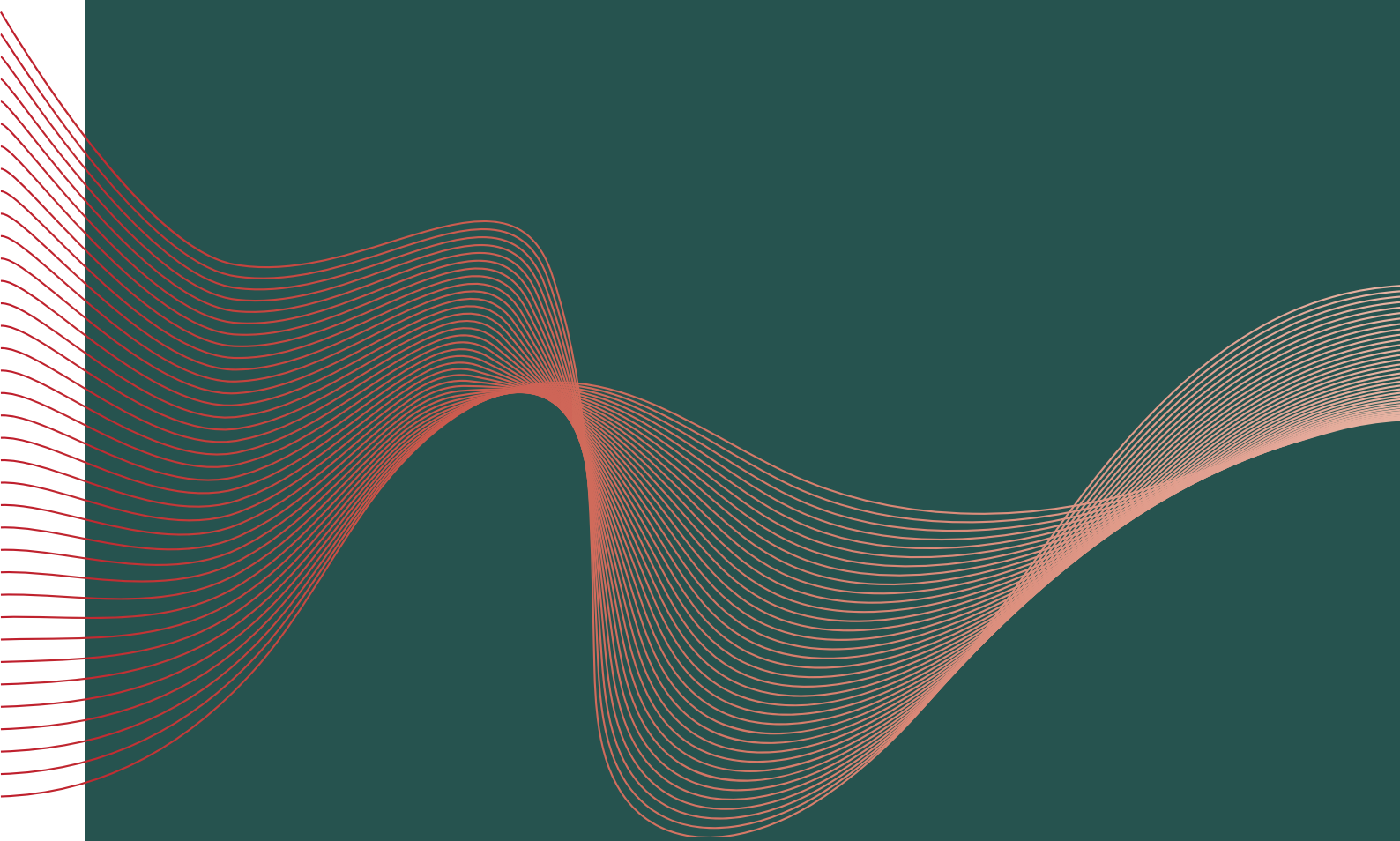
- Anggota Dewan Audit Bank Indonesia

2003-2004

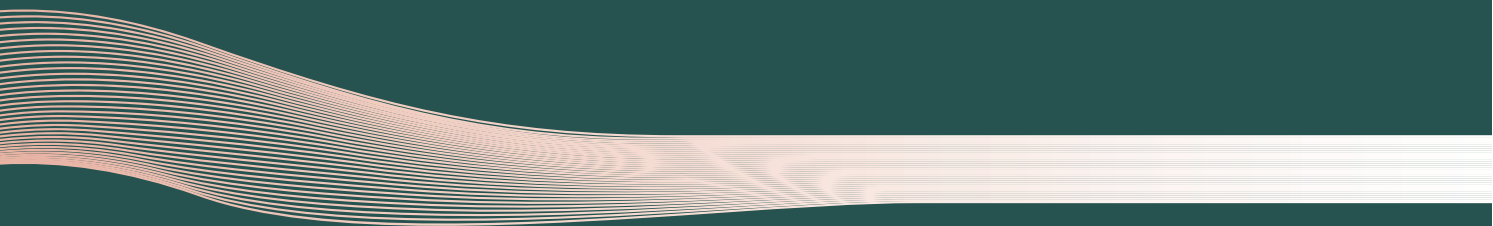
- Dewan Penasihat KADIN Indonesia-Jepang

2004-2005

Wafat: Munchen, Jerman, 26 Mei 2005











Memperingati  
**Hari Batik Nasional**  
2 Oktober 2024

Batik **kawung** merupakan salah satu motif khas batik **Yogyakarta**